

**Laporan Penelitian
Bisnis Militer
di Boven Digoel
Papua**

**Tim Penelitian Bisnis Militer
di Boven Digoel, Papua**

**Komisi untuk Orang Hilang dan
Korban Tindak Kekerasan
(Kontras)
Februari – Maret 2004**

Daftar Isi

BAB I	PROFILE WILAYAH	5
	• Papua	5
	• Kabupaten Merauke	10
	• Kabupaten Boven Digoel	11
	• Distrik Jair	13
	• Distrik Mindiptana	15
BAB II	PERUSAHAAN DAN PELUANG BISNIS	17
	• PT KORINDO	17
BAB III	APARAT KEAMANAN DAN OPM	23
	• Profil Aparat Keamanan	23
	• Bisnis Militer	27
	• TPN/OPM Willem Onde	29
BAB IV	DINAMIKA DAN RELASI	33
	• Pola Hubungan TPN/OPM, aparat keamanan dan Perusahaan	33
	• Militer, politik dan Bisnis Pengamanan	34
	• Bubarnya “Kongsi” Korindo-TNI-Willem Onde: Kasus penculikan terhadap karyawan PT Korindo	37
	• Konflik Sebelum Masuknya Perusahaan	39
	• Konflik perusahaan dengan warga lokal	41
BAB V	STUDY KASUS: PEMBUNUHAN TERHADAP WILLEM ONDE DAN JOHN TUMIN KANDAM	43
	• Kronologis peristiwa penculikan dan pembunuhan	43
	• Tindakan Pasca Peristiwa	46
BAB VI	DAMPAK-DAMPAK	49
	• Dampak Ekonomi	49
	• Dampak Sosial Budaya	49
	• Dampak Lingkungan	50
BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	51
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	53

Bab I

Profile Wilayah

I. PAPUA¹

Geografis

Diatas peta pulau Irian tampak sebagai burung raksasa. Mungkin ada yang menganggapnya lebih mirip seekor dinosaurus, yaitu binatang dari kala Mezoikum yang kini telah punah². Pulau Papua adalah pulau terbesar ke-2 dalam wilayah Republik Indonesia setelah Pulau Kalimantan dan merupakan propinsi dengan luas daratan terbesar di Indonesia. Menurut data BPS³ luas area Papua 421,981 sqkm⁴, dengan jumlah penduduk berdasar sensus 2000 sebanyak 1.697.980 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus delapan puluh) jiwa. Sehingga rasio rata-rata per/km 6 jiwa.

POPULASI PENDUDUK ⁵	
Laki-laki (dalam ribuan)	897.59
Perempuan (dalam ribuan)	800.39
Total Laki-laki + Perempuan (dalam ribuan)	1,697.98
Kepadatan penduduk/Km ²	6
Perbandingan jenis kelamin	110.4
Pertumbuhan penduduk (1990-2000)	3.22
Total Fertility Rate (1996-1999)	3.28
Infant Mortality Rate per 1000 Live Births (1996)	57
Male Life Expectancy at Birth (1996)	61.07
Female Life Expectancy at Birth (1996)	64.83

¹ Nama Papua, Irian, Irian Barat, Papua Barat dan Irian Jaya adalah mengacu pada satu wilayah yang sama.

² Koentjaraningrat dkk, Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk, penerbit Djambatan, Jakarta 1994, hal: 3

³ BPS Statistik Indonesia, Web site.

⁴ Dalam www.wordiq.com, disebutkan luas papua 420,540 km²

⁵ BPS, opcit

Untuk menggambarkan Kondisi Geografis Papua, dibawah ini kutipan dari www.wordiq.com:

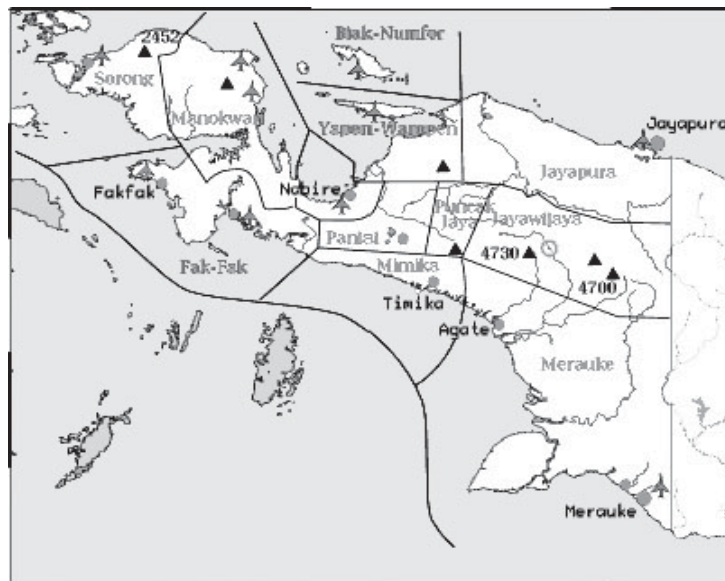
A central East-West mountain range dominates the geography of New Guinea, over 1600 km in total length. The western section is around 600 km long and 100 km across. Steep mountains 3 to 4 km and up to 5 km high along the range ensures a steady supply of rain from the tropical atmosphere. The treeline is around 4 km high and the tallest peaks are snowbound year round.

Both North and West of the central ranges the land remains mountainous mostly 1 to 2 km high covered by thick rain forests and a warm humid year round climate.

The third mainland terrain is the south east lowlands with extensive wetlands stretching for hundreds of kilometers.

The province has 40 major rivers, 12 lakes, and 40 islands. The famous Baliem Valley home of the Dani people is a tableland 1600 m above sea level in the midst of the central mountain range; Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) is a mist covered limestone mountain peak 5030 m above sea level.

LAND AREA	
Area	420,540 km ²
Comparable	California
Average Annual Climate	
Rain fall	1.8 to 3 m
Temperature	19-28 C
Humidity	80%



Pada tahun 2001 Papua terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota madya. 117 kecamatan, 66 kelurahan dan 830 desa.

Kabupaten-kabupaten hingga tahun 2001 meliputi Biak Numfor; Fak-fak; Jayapura; Jayawijaya; Manokwari; Merauke; Mimika; Paniai; Sorong; Timika; Wamena; and Yapen Waropen. Pada tahun 2003 di Papua dibentuk dua buah propinsi baru dan empat kabupaten⁶, yaitu pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Selain itu juga terjadi pemekaran-pemekaran ditingkat Kabupaten.

Sejarah Papua

Seperti halnya kepulauan di Nusantara, pulau ini punya sejarah panjang diduduki bangsa asing. Pada tahun 1600, William Jansen, pelaut asal Belanda, mendarat di Pulau Kai, Pulau Aru; dan Pantai Barat Daya Papua. Sepuluh tahun kemudian menyusul pelaut lainnya dari Belanda, William Schouten dan Le Maire, yang melakukan pelayaran sampai ke Teluk Cenderawasih. Lalu, Jan Cartstenz tahun 1622 melakukan pelayaran di sebelah selatan Papua guna mencari perluasan daerah jajahan VOC. 9 November 1774: Belanda jatuh ke tanggg Inggris, otomatis kekuasaan jalur rempah-rempah Belanda di Papua menjadi miliknya. Setelah menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Tidore, tahun 1793 Inggris menguasai dan menjadikan Papua koloni. Untuk menguasai wilayah Papua, Inggris juga mendirikan benteng Coronation di Teluk Doreri, Manokwari. Namun baru pada tahun 1828, Belanda mengklaim Papua barat sebagai miliknya. Atas nama Raja Belanda, AJ van Delden, seorang komisaris yang dikirim oleh Gubernur Belanda di Maluku, membangun benteng untuk didiami militer Belanda. Ia juga memproklamasikan Nieuw Guinea (Papua Barat) sebagai milik Belanda. Tanggal 16 Mei 1895, tercapai kesepakatan antara Pemerintah Belanda dan Inggris. Belanda menguasai Papua sebelah barat dan Inggris menguasai Papua sebelah timur berbagi dengan Jerman.

7 Maret 1910: Keluar Deklarasi Batavia yang menyatakan Nederlandsch Nieuw Guinea (Papua Barat) tidak termasuk Hindia Belanda. Batas-batas wilayah Hindia Belanda mulai Aceh sampai Maluku, sedangkan Papua berada langsung di bawah Pemerintah Belanda di Belanda.

⁶ pada tahun 2003 pemerintah RI mengeluarkan Inpres No.I/2003 mengenai Percepatan Pemekaran Provinsi Papua berdasarkan UU No.45/1999, sehingga Papua terbagi menjadi tiga propinsi, yaitu propinsi Irian Jaya Bagian Barat, Irian Jaya Bagian Tengah dan propinsi Irian Jaya. Pemekaran ini membawa kontroversi bagi masyarakat Papua. Pada 23 Agustus 2003, Provinsi Irian Jaya Tengah dideklarasikan di Timika oleh keenam bupati dan ketua DPRD yang ada wilayah provinsi tersebut. Pendeklarasian itu diwarnai aksi penolakan sekelompok masyarakat yang menimbulkan bentrok antara kelompok pendukung dan penentang pemekaran provinsi. Lima warga tewas dalam bentrokan yang berlangsung selama beberapa hari itu. Sehingga pada 27 Agustus 2003, Pemerintah menunda pemekaran Provinsi Papua kecuali Provinsi Irian Barat. Pada masa penundaan ini, pemerintah akan meninjau kembali UU No 45/1999, UU No 21/2001, dan Inpres No 1/2003 tentang Pemekaran Daerah Papua.

7 Desember 1941: Pemerintah Belanda meninggalkan Papua ketika meletus Perang Pasifik. Kekuasaan di Papua digantikan oleh Jepang yang masuk ke Papua setelah menyerang Pearl Harbour. Kemudian, 22 April 1944, Jepang mengakhiri pendudukannya di Papua setelah armada Angkatan Laut AS yang dipimpin Jenderal Mac Arthur merapat di Jayapura.

17 Agustus 1956: Pemerintah Indonesia meresmikan pembentukan Provinsi Irian Barat Perjuangan dengan ibu kota Soasiu di Maluku Utara dan Sultan Tidore Zainal Abidin Syah sebagai gubernurnya.

1 Desember 1961: Belanda memerintahkan bendera Bintang Kejora Papua Barat dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda. Momentum ini yang dianggap Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Bendera nasionalnya adalah Sang Bintang Fajar Timur (Bintang Kejora), lagu kebangsaannya adalah Hai Tanahku Papua ciptaan Pendeta IS Keyne, dan lambang negaranya adalah burung mambruk.

19 Desember 1961: Di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (Trikor) dengan perintah, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan kerahkan semua kekuatan, termasuk para sukarelawan, untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dengan merebut Irian Barat.

11 Januari 1962: Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat berkedudukan di Makassar, dipimpin Mayor Jenderal Soeharto. Berkat operasi militer ini, perjuangan diplomasi untuk mengembalikan Irian berhasil dan merupakan salah satu faktor yang mendorong pihak Amerika Serikat mendesak Belanda untuk mengembalikan Irian Bagian Barat kepada Indonesia lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

15 Agustus 1962: Tercapai persetujuan Indonesia-Belanda di New York, AS, yang lalu disebut New York Agreement. Persetujuan itu ditetapkan berdasarkan Resolusi PBB Nomor 1752. Isinya, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). New York Agreement juga mengamanatkan, sebelum akhir tahun 1969, Indonesia wajib mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang ditawarkan kepada penduduk Irian Barat, tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memutuskan hubungan dengan Indonesia.

1 Oktober 1962: Belanda meninggalkan Irian Barat yang telah dikuasainya selama lebih dari satu setengah abad dan menyerahkan kepada PBB. Pada 1 Mei 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

5 April 1967: Freeport-McMoRan Copper & Gold, sebuah perusahaan pertambangan dari Amerika Serikat, memulai usaha pertambangan secara resmi dengan menandatangani kontrak karya selama 30 tahun. Sejak itu, perusahaan yang di Irian dinamakan PT Freeport Indonesia ini mulai mengeksploitasi Ertsberg (gunung bijih).

Juli-Agustus 1969: Masyarakat Irian Barat melalui Dewan Musyawarah Pepera di 8 kabupaten yang ada di Irian Barat melaksanakan Pepera disaksikan utusan PBB, Ortis Sanz. Hasilnya, Irian Barat memilih untuk bergabung dengan Indonesia. PBB pada tanggal 19 November mengesahkan hasil Pepera melalui Resolusi PBB No 2504 dengan 84 negara menyatakan setuju dan 30 negara abstain.

1 Juli 1971: Brigjen Seth J Rumkorem, mantan anggota intelijen dari Kodam Diponegoro, memproklamasikan Negara Republik Papua Barat di Jayapura. Jejak itu diikuti oleh sembilan mahasiswa Universitas Cenderawasih dengan mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Abepura dan memproklamasikan berdirinya Negara Papua Barat pada bulan Juli 1982. Tanggal 14 Desember 1988, Thomas Wanggai, doktor di bidang administrasi pemerintahan lulusan Jepang dan AS, juga memproklamasikan Negara Melanesia Barat di Lapangan Mandala Jayapura.

Sejak proklamasi tahun 1971 itulah, pemerintah Indonesia mengirimkan Angkatan bersenjata ke Papua untuk menumpas OPM. Namun demikian, anggota OPM yang dinyatakan hanya berjumlah puluhan saja, terus menjadi alasan untuk dilakukannya operasi militer di Irian Jaya selama 20 tahun tanpa pernah berhasil menumpas Gerakan tersebut dan pada kenyataannya hanya menimbulkan ketakutan dan korban dikalangan rakyat sipil. Operasi Militer ini pada akhirnya membentuk sebuah kebencian yang mengakar terhadap pemerintah Indonesia.

Disisi lain pembangunan yang digaungkan dari Jakarta, hanya dilaksanakan guna menunjang sarana proyek pertambangan, sementara devisa yang didapat negara dari bumi papua diboyong seluruhnya ke Jakarta. sehingga pembangunan hanya berarti eksploitasi bagi rakyat papua.

Pengalaman bergabung dengan Indonesia menjadi memoria passionis (ingatan kolektif) tentang penindasan hak asasi manusia dari segala segi: baik hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan pemerintahan Indonesia dibawah rejim Soeharto yang militeristik telah menimbulkan trauma dan antipati yang mendalam terhadap Indonesia.⁷

⁷ SKP Keuskupan Jayapura, *Gambaran Permasalahan di Papua, makalah presentasi dalam pertemuan dengan presiden R.I.* 27 Juni 2000

II. KABUPATEN MERAUKE

1. Kondisi Geografis dan Kependudukan

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Merauke memiliki luas area 119.749 m² atau 28,87% dari luas Propinsi Papua, terletak pada 137°30'-141°00' BT dan 5°00'-9°00'LS dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, sebelah Timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika

Wilayah ini mempunyai iklim hujan dan kemarau, dimana musim kemarau lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Musim hujan terjadi sekitar 5 bulan (Desember-April) dan musim kemarau terjadi sekitar 7 bulan (Mei-November).

B. Demografi

Sampai dengan Desember 2002, jumlah penduduk Kabupaten Merauke sebanyak: 350.236 jiwa, yang terdiri dari 183.217 jiwa laki-laki dan 167.019 jiwa perempuan. Di wilayah ini terdapat suku-suku besar dan sub suku asli. Suku besar yang ada antara lain; Marind, Auyu, Muyu, Wambon (Mandobo), Yaghai dan Asmat. Sedangkan sub suku yang ada antara lain; Marori, Kanum, Yei, Kimaam, Yelmek, Kuruwai, Kumbai, Wiyagar, Jair, Citak Mitak.

2. Sumber Daya Alam

Wilayah ini memiliki hutan tropis 11.768.265 hektar. Selain kehutanan, perikanan juga merupakan kegiatan ekonomi yang cukup potensial di wilayah ini. Tercatat, produksi perikanan tahun 1999 dan 2000 di atas kabupaten/kota lain di Papua. Kontribusi tahun 2000 besarnya Rp 157,1 milyar. Angka ini menunjukkan kenaikan hampir lima puluh persen dari tahun 1999 yang besarnya Rp 104,9 milyar. Hal ini dikarenakan luas perairan laut Negeri Burung Kasuari ini pun terbilang besar, 75.000 kilometer persegi. Belum ditambah perairan umum 71.000 kilometer persegi. Dari kedua jenis perairan ini dihasilkan antara lain udang, ikan pelagis, ikan demersal, kakap, belanak, dan tengiri.

Selain itu di wilayah ini juga banyak menghasilkan ikan arwana. Meski tidak tergolong potensi perikanan laut karena lebih banyak ditemukan di sungai-sungai di Merauke. Perburuan ikan arwana, khususnya yang masih anakan, sempat merajalela di tahun 2000. Populasi terbesar ikan ini di Sungai Kumbe, Bulaka, Biau, dan salah satunya di Sungai Digul.

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2002 mulai tanggal 11 Desember 2002, Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi 3 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Mappi dengan Ibu Kota di Kepi, Kabupaten Boven Digul dengan Ibukota di Tanah Merah dan Kabupaten Asmat dengan Ibu Kota di Agats, serta satu kabupaten Induk yaitu Kabupaten Merauke.

III. KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Boven digul, merupakan daerah yang cukup terkenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia karena digunakan sebagai daerah pembuangan tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan Indonesia. Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir pernah dibuang ke sini. Area ini dibangun pada 27 Januari 1927 oleh Kapten LTh Becking. Kawasan itu dulunya merupakan hutan rimba dan rawa-rawa tempat hidup ular dan buaya. Banyak juga korban pengasingan yang meninggal karena serangan nyamuk malaria. Tanah Merah di masa kini adalah ibu kota Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.

Kabupaten wilayah Boven Digoel memiliki luas wilayah ± 27.108 Km² terdiri dari 5 Distrik yaitu, Jair, Mandobo, Mindiptana, Waropko, Kouh, dengan Ibu kota Kabupaten di Tanah merah, Distrik Mandobo.

Kabupaten Boven Digoel mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Distrik Suator Kabupaten Asmat dan Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang; Sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea; Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Muting dan Distrik Okaba Kabupaten Merauke; dan Sebelah barat berbatasan dengan Distrik Edera, Distrik Obaa, dan Distrik Cital Mitak Kabupaten Mappi.

1. Kondisi Masyarakat

Pola hidup sebagian besar masyarakat masih sampai pada tingkatan masyarakat meramu, dimana masyarakat belum memproduksi makanannya. Untuk memperoleh makanan masyarakat masih banyak yang mengandalkan hasil hutan baik berupa pohon-pohonan yang tumbuh secara liar maupun berburu binatang. Di beberapa daerah memang sudah ada kegiatan perkebunan dan peternakan tapi belum dilakukan oleh seluruh masyarakat. Lompatan fase kehidupan yang dialami oleh masyarakat dari meramu langsung ke industri (kapitalisme) menyebabkan banyak masyarakat gagap dalam menghadapi sistem produksi yang masih sangat baru bagi mereka. Selain karena sistem produksi yang baru, masuknya sistem kapitalisme yang baru juga sangat dipaksakan, dan tidak melalui suatu proses yang natural. Ketergantungan masyarakat pada alam membuat mereka dinilai malas oleh pihak lain⁸.

Masyarakat masih hidup dalam suku-suku di wilayah tertentu. Suku-suku yang ada menguasai satu wilayah tertentu (tanah adat/ulayat). Sayangnya tidak ada batasan yang jelas antara tanah milik suku yang satu dengan yang lain. Batas tanah adat biasanya hanya berupa sungai, bukit, atau pohon. Generasi muda juga kurang mengetahui dengan jelas kepemilikan suku atau marga yang memiliki tanah tersebut⁹. Pengetahuan mengenai tanah adat hanya diketahui melalui cerita tua-tua/nenek moyang mereka.

⁸ Wawancara dengan tokoh agama di BD

⁹ diskusi dengan masyarakat Getentiri dan Mindiptana

1.1 Budaya masyarakat

Boven Digoel didiami oleh 3 suku yang tersebar di 10 kecamatan, suku Muyu, Mandobo, Auyu. Mata pencaharian utama dari suku-suku ini adalah berburu, menangkap ikan, berkebun dan produksi sagu serta memelihara babi¹⁰. Binatang buruan dari suku-suku ini adalah babi dan kasuari, yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sukunya sendiri. Bila musim cukup baik dan ikan banyak di kali, maka penduduk akan mencari ikan dengan menggunakan busur, anak panah ataupun membendung sungai yang tidak begitu besar, dengan cara yang terakhir orang dapat menangkap ikan, udang dan mungkin juga kerang.

Makanan utama penduduk adalah sagu, untuk membuat kebun sagu dan tanaman lain seperti pisang, uni keladi, ubi jalar, tebu ikan dan pohon melinjo, penduduk biasanya membuka lahan hutan. Memelihara babi merupakan aspek lain dari ekonomi, karena terkait dengan sistem keuangan. Tujuan utama dari memelihara babi bukan untuk memenuhi kebutuhan akan daging tapi untuk memperoleh uang. Babi yang dipelihara tidak dikandangan, melainkan dibiarkan berkeliaran disekitar rumah maupun didalam rumah.

Tanah merupakan satu komponen penting bagi penduduk dan pertahanan adat. Karena yang menjadi alat pertahanan adalah tanah, maka masyarakat umumnya tidak mudah menjual tanah dengan maksud agar suku dan keturunannya tetap bertahan. Tanah merupakan satu-satunya pertahanan. Karena di tanah warisan dapat bertumbuh dan berkembang. Selain itu aturan adat dan budaya juga harus dikembangkan, generasi muda harus mengetahui adat, budaya dan bahasa. Dokumentasi tertulis mengenai aturan adat yang jelas belum ada padahal hal itu juga dapat menjadi alat pertahanan. Bahasa dan seni dari suatu suku selama ini sangat kurang menjadi perhatian baik dari anggota suku, LMA dan juga pemerintah.

Tanah merupakan satu materi pertahanan yang sangat penting bagi suku-suku di wilayah papau. Karena dengan tanah, eksistensi suku tetap diakui. Adanya tanah yang tetap dimiliki oleh suku dan keturunannya, maka kepemilikan tanah secara turun temurun menjadi sangat penting bagi tiap suku. Namun demikian karena memang tidak ada sertifikat kepemilikan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Tanah adat/tanah ulayat yang dimiliki oleh tiap suku seringkali dianggap sebagai kambing hitam yang menghambat pembangunan. Salah satu contoh saat di Getentiri akan dibangun lapangan terbang, ada beberapa suku yang tidak memperbolehkan pembangunan lapangan terbang tersebut. Hal itu dikarenakan tidak adanya kompensasi bagi pemilik tanah. Masing-masing suku/pemilik tanah ulayat memiliki peraturan yang berbeda, bahkan di tiap marga dalam satu suku pun terdapat perbedaan dalam kebijakan penjualan tanah ulayat mereka. Hal ini kemudian banyak dimanfaatkan untuk menyulut konflik antar mereka untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki modal. Pada prinsipnya masyarakat tidak pernah menolak pembangunan, hanya

¹⁰ J.W. Schroorl, 1997 'Kebudayaan dan Perubahan SUKU MUYU dalam arus modernisasi Irian Jaya'

saja diharapkan harus adil bagi kedua belah pihak baik pihak pembangun (developer) maupun pemilik tanah. Masyarakat justru mengharapkan pembangunan dapat masuk ke wilayah mereka dan memberikan fasilitas dan kemudahan bagi mereka, terutama untuk pengembangan sumber daya manusia.

Wilayah Boven Digul didiami oleh tiga suku yang masing-masing mempunyai banyak marga dan perbedaan bahasa terutama pada dialek yang digunakan. Tiga suku tersebut ialah:

1. Suku Muyu: tersebar di beberapa wilayah Kab. Boven Digul, diantaranya di wilayah Asiki, Mindiptana, Getentiri.
2. Suku Mandobo: berada disekitar wilayah kali Kao, Mindiptana, Getentiri dan Asiki.
3. Suku Auyu: banyak terdapat di wilayah Sungai digul, Asiki, dan Sungai Mappi.

Penelitian di Boven Digul dipusatkan di dua distrik, yaitu distrik Jair dan Distrik Mindiptana.

IV. DISTRIK JAIR

Distrik Jair terdiri dari 10 kampung yaitu Kampung Kasan, Kampung Wayau, Kampung awat, Kampung Meto, Kampung Asiki, Kampung Ujungkia, Kampung Anggai, Kampung Butiptiri dengan pusat Distrik di Kampung Getentiri.

Wilayah ini memiliki batas wilayah sebelah Utara bertatasan dengan Distrik Mandobo; sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Okaba dan Distrik Muting; sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Mindiptan; sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Okaba

Potensi utama dari wilayah ini adalah perkebunan kelapa sawit yang selama ini dikelola oleh PT Tunas Sarwa Erma yang merupakan anak perusahaan dari PT Korindo Group.

1. Kampung Getentiri¹¹

Sebagai pusat distrik Jair, masyarakat maupun aparat pemerintahan dikampung ini merasa didiskriminasi oleh pihak pemerintah. Sebagai pusat distrik, kampung ini tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan distrik. Kantor kecamatan hanya berupa rumah kecil tanpa fasilitas yang lebih sering terlihat kosong dan tidak ada aktivitas. Dana operasional daerah sampai bulan Maret 2004 tidak pernah diterima oleh distrik, sehingga aktivitas memang belum berjalan. Pos keamanan (Polsek) distrik yang seharusnya ditempatkan di kampung ini pun malah berdiri di kampung Asiki, lokasi perusahaan PT Korindo Group.

¹¹ Lihat notulensi Getentiri

Suku yang tinggal di wilayah Getentiri adalah Suku Muyu, Mandobo, Jair dan Awyu. Selama ini hubungan antar suku-suku tersebut dapat dikatakan kurang baik. Sering terjadi konflik antar suku yang biasanya disebabkan oleh persoalan rebutan perempuan, batas tanah ulayat, binatang peliharaan yang masuk ke wilayah suku lain. Konflik antar suku yang terjadi kerap kali berakhir dengan kematian salah satu pihak yang berkonflik.

Persoalan mendasar dari konflik antar suku adalah karena tidak terorganisirnya suku-suku yang mendiami wilayah ini. Krisis kepemimpinan juga terjadi dalam tiap suku. LMA yang seharusnya menjadi pemimpin dan penyalur aspirasi masyarakat kurang mendapat kepercayaan karena pemilihan pemimpin LMA yang juga tidak memiliki mekanisme yang jelas, ditunjuk oleh bupati ataupun pemerintah setempat. Selain itu juga, pernah terjadi pemanfaatan oleh LMA dalam hal penyewaan hak ulayat oleh perusahaan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat.

2. Kampung Asiki

Kampung Asiki merupakan pusat kegiatan PT Korindo Group yang dihuni oleh mayoritas masyarakat pendatang yang bekerja sebagai buruh pabrik, pedagang dipasar dan supir-supir, baik supir taksi umum maupun supir hardtop. Selain masyarakat sipil, kampung Asiki juga merupakan tempat aparat keamanan distrik berkumpul.

Adanya perusahaan Korindo Group menyebabkan banyaknya pendatang dari luar Papua mencari penghidupan. Dengan masuknya perusahaan, dapat dikatakan kampung ini menjadi pusat perputaran roda ekonomi. Semua yang ada di kampung ini tergantung dari Korindo mulai dari air bersih, listrik, sampai komunikasi. Fasilitas yang ada diperoleh karena adanya perusahaan, salah satu contoh adalah fasilitas listrik, di kampung lain listrik hanya menyala 6 jam saja, tapi di Asiki -setelah adanya tuntutan dari para buruh- listrik menyala 24 jam. Masyarakat pun sangat tergantung kepada perusahaan, karena apapun usaha yang dijalankan itu semua ada karena adanya perusahaan ditengah pedalaman Papua ini.

Namun keberadaan Korindo tidak banyak membawa kebaikan pada ekonomi masyarakat lokal. Dapat dikatakan suku lokal (Muyu) yang seharusnya menjadi suku pemilik sah tanah wilayah Asiki malah tergusur. Masyarakat asli yang menjadi buruh pada perusahaan umumnya tidak bisa mengikuti ritme kerja perusahaan, hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari mental masyarakat yang masih peramu.

Sebagaimana pepatah “Ada gula ada semut” atau orang Asiki bilang “laron akan mendatangi lampu”, maka terjadilah dua kantor aparat keamanan itu berada di Asiki, sekalipun Asiki hanya salah satu kampung dan bukan kota distrik (kecamatan). Beberapa keluhan masyarakat menginginkan agar dua kantor aparat tersebut dipindahkan ke pusat distrik di Getentiri, karena tidak ada yang menangani ketertiban masyarakat di kota distrik selain itu koordinasi juga sulit dilakukan, karena hanya kantor Camat saja yang berada di Getentiri¹².

¹² wawancara dengan masyarakat dan Camat di Getentiri pada 21-23 Maret 2004

Koramil Jair berada tepat ditengah-tengah pasar Asiki yang juga merangkap sebagai terminal. Tepat disamping kanan Koramil juga berdiri sebuah wartel, mungkin ini kantor kedua, karena anggota juga jaga disana dan akan melayani pengunjung wartel dengan baik. Sedang kantor Polsek Jair berada agak diluar tapi juga tak lebih 100 m jaraknya dari pasar yang menjadi pusat kota industri Asiki¹³.

V. DISTRIK MINDIPTANA¹⁴

Merupakan distrik yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini (PNG) disebelah timurnya. dimana berdiri pos penjagaan perbatasan. Hal itu mengakibatkan banyak beredar minuman keras dan obat-obatan yang diperdagangkan oleh militer yang bertugas. Selain itu keberadaan militer diwilayah ini juga mengakibatkan banyaknya intimidasi terhadap penduduk lokal karena keberpihakannya pada salah satu pihak yang berkonflik antar masyarakat.

Persoalan masyarakat lain diwilayah kecamatan ini adalah krisis ekonomi yang disebabkan rendahnya penghasilan masyarakat, karena hasil masyarakat umumnya tidak dapat dijual. Di wilayah ini banyak terdapat perkebunan karet yang dimiliki dan disadap oleh masyarakat lokal. Kebun karet Kebun Dinas Perkebunan (Kabupaten Induk) diwilayah ini mencapai luas total 25 Ha, hingga kini belum ada sertifikat. Namun sangat disayangkan bahwa kemudian ada persoalan dalam penjualan karet berupa lateks beku (lumps). Selama ini masyarakat menjual hasilnya ke PNG (Distrik Kionga), hal ini pun kurang ditunjang dengan alat transportasi yang memadai karena jalan raya Mindiptana – Imko – Mokbiran baru mencapai Kali Muyu dan belum seluruhnya selesai.

PENELITIAN BISNIS MILITER

1. Metode

Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam Workshop Modul Penelitian Keterlibatan Militer dalam Bisnis yang telah dilakukan sebelum penelitian lapangan, metode Penelitian ini menggunakan pendekatan **Kontekstualisasi Progressif** dan **Etnografi Praktis**.

Metode kontekstual progresif melihat kondisi dari ;

- a. tindakan aktor
- b. jejaring aktor tertentu di lokasi
- c. konsekuensi yang diharapkan dan tidak diharapkan oleh tindakan aktor dan jejaring aktor

¹³ pengamatan di pasar Asiki, pada 8-10 Maret 2004

¹⁴ lihat notulensi pelatihan Mindiptana

Sedangkan pendekatan Etnografi Praktis melihat fenomena di masyarakat melalui ;

- a. Sejarah
- b. Profil Sosial penduduk setempat (etnis, agama, jenis kelamin, dll)
- c. Mata Pencaharian
- d. Organisasi Sosial (pengelompokan-pengelompokan sosial)

A. Teknik penelitian

Teknik yang dipakai untuk mendapatkan data dalam metode ini adalah

1. Wawancara
2. Pengamatan
3. Pencatatan Lapangan
4. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)
5. Visualisasi (Sketsa, peta, foto, film)
6. Penelusuran Data Sekunder

Untuk mendapatkan data secara praksis di lapangan, dibuat 2 pertanyaan dasar yang masing-masing memiliki turunan pertanyaan. yaitu ;

1. Bagaimana sejarah dan pola tindakan bisnis militer dan polisi di lokasi penelitian.
2. Apa konsekuensi tindakan bisnis tersebut terhadap Kondisi HAM di lokasi penelitian

B. Pencatatan Data Lapangan

Dalam pencatatan data di lapangan minimal ada beberapa bentuk catatan :

- a. Laporan ringkas.
- b. Laporan yang diperluas.
- c. Jurnal penelitian lapangan.
- d. Diskusi tim peneliti.

C. Waktu dan ruang lingkup wilayah penelitian

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah daerah Kabupaten Boven Digoel beserta wilayah sekelilingnya yang berkaitan dengan lokasi PT Korindo.

Bab II

Perusahaan dan Peluang Bisnis

Perusahaan-perusahaan yang terdapat di kabupaten Merauke, secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori, Industri kecil Formal, industri kecil non formal dan industri menengah. Pada tahun 2001, usaha Industri kecil Formal sebanyak 139 unit dengan nilai investasi 2.005.872.900 rupiah dan nilai produksi 10.940.651.500 rupiah. Usaha Industri kecil non formal sebanyak 334 unit dengan nilai investasi sebesar 240.555.650 rupiah dan nilai produksi 3.286.517.000 rupiah. Sedangkan industri menengah sebanyak 6 unit dengan nilai investasi 29.678.005.000 rupiah dan nilai produksi 10.584.086.000 rupiah. Hingga total unit usaha sebanyak 479 dengan nilai investasi 31.924.433.550 rupiah dan nilai produksinya 24.811.254.500 rupiah¹⁵. Pada tahun 2002, jumlah industri kecil formal sebanyak 156 unit dan industri menengah sebanyak 7 unit dengan jumlah keseluruhan investasi mencapai 170.172.257.000 rupiah, dengan nilai produksi 547.717.857.000 rupiah¹⁶.

Dalam realisasi hasil ekspor 2002, dua anak perusahaan Korindo Group yaitu PT. BADE MAKMUR ORISA mempunyai nilai ekspor sebesar 51.437.527,37 US\$/Rp. 411.500.218.960¹⁷ dari total keseluruhan nilai ekspor sebesar 74.488.532,66 US\$/Rp. 595.908.261.280¹⁸, dengan demikian kedua anak perusahaan tersebut mempunyai nilai ekspor 69% dari total keseluruhan nilai ekspor kabupaten Merauke¹⁹.

I. PT KORINDO

1. Sejarah PT Korindo Group di Papua²⁰

1993, February PT. BADE MAKMUR ORRISA mulai beroperasi di kabupaten Merauke. Mulai dengan produksi di wilayah dengan luas HPH 463,600 ha

¹⁵ Merauke dalam Angka tahun 2001, opcit. Hal. 231

¹⁶ Pemerintah Kabupaten Merauke potensi dan Peluang investasi, kantor pengolahan data elektronik 2003.

¹⁷ Dengan kurs Rp.8000/1 US\$

¹⁸ ibid

¹⁹ Pemerintah Kabupaten Merauke potensi dan Peluang investasi, Opcit.

²⁰ website Korindo, www.korindo.com

1993, April	Memperoleh 244,850 ha dari PT. TUNAS SAWA ERMA. Dan kemudian memulai produksi logging
1994, September	Memulai persiapan lahan di ASIKI untuk membangun perusahaan Plywood
1996, Februari	Mulai mencoba memproduksi plywood 4 lapis.
1996, April	Mulai menambahkan 2 lapis untuk produksi kedua pembuatan papan tulis. Total kapasitas produksi mencapai 18.000 m ³ /bulan
1996, June	Peresmian produksi total plywood
1997, Februari	Menambah lagi produksi dengan memproduksi tego film, untuk pelapis plywood. Memperoleh penghasilan total produksi 3.000 m ³ /bulan
1998, April	Menambahkan pilihan 2 lapis untuk produksi plywood, dengan total produksi 18.000 m ³ /bulan
1998, Juni	Launching proyek produksi Minyak sawit.
2000	Relokasi pabrik plywood ke divisi Pangkalan Bun

2. Wilayah kerja PT Korindo Group²¹

Pusat perusahaan berada di kampung Asiki, Distrik Jair. Di pusat perusahaan lokasi ini berdiri pabrik pengolahan plywood dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Lahan yang digunakan untuk pabrik tidak terlalu besar mungkin hanya sekitar 5 ha untuk keseluruhan pabrik.

Perusahaan ini memiliki Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pengusahaan Tanaman Industri yang sangat luas. Saat ini wilayah PT Korindo Group sudah ada di beberapa kampung di wilayah Boven Digoel, diantaranya Getentiri, Sesnukt, Muting, Asiki, Kali Fly, Kali Muyu Muara yang sesuai dengan surat ijin, namun sekarang sudah hampir diseluruh kampung di sepanjang kali Digoel dan kali Kao dan ini sudah tidak sesuai dengan HPH²². HPH/HPTI yang dimiliki oleh perusahaan sejak tahun 1993 ini masih mungkin bertambah terus sampai 11 tahun mendatang, karena HPH berlaku untuk jangka waktu 20 tahun.

3. Anak perusahaan PT Korindo²³

Korindo Group memiliki empat anak perusahaan di wilayah Boven Digul, yaitu,

- **PT Bade Makmur Orisa** bergerak di bidang plywood dan film faced
- **PT Tunas Sarwa Erna** bergerak di bidang logging, suply kayu untuk produksi plywood BMO dan pengolahan kelapa sawit/pabrik CPO

²¹ lihat notulensi pelatihan Getentiri

²² wawancara dengan masyarakat di Sentini, 21 Maret 2004.

²³ wawancara dengan perwakilan Korindo di Merauke, 2 Maret 2004.

- ***PT Korindo Abadi*** bergerak di bidang film formalin, bahan pelapis untuk plywood
- ***PT Pelayanan Korindo*** bergerak di bidang pengangkutan barang-barang untuk lokal logistik, sparepart, dari lokasi penebangan ke pabrik.

3.1. PT Bade Makmur Orisa (BMO)

Bergerak dibidang industri plywood sesuai dengan SP Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM No. 763/XII/PMDN/1991 tanggal 12 Desember 1991 dengan luas Hak Pengelolaan Hutan (HPH) 707.450 Ha yang tersebar pada distrik Jair, Mandobo dan Mindiptana dengan jarak waktu kontrak 20 tahun dan apabila masih memungkinkan, maka kontrak tersebut dapat diperpanjang menjadi 40 tahun. Produksi plywood 97% diekspor ke Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea dan 3% dipasarkan didalam negeri yaitu Asiki, Merauke, dan Surabaya. Sementara seluruh produksi film faced diekspor. Mulai Januari sampai dengan Agustus 2003, produksi mencapai 87.535 m³ dengan volume ekspor 87.239 m³ yang seluruhnya memiliki nilai ekspor US\$ 25.456.951.

3.2. PT Tunas Sarwa Erma

Bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan minyak sawit (CPO) sesuai dengan SP Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM No. 96/X/PMDN/2002 tanggal 8 Oktober 2002 dan Hak pengelolaan hutan didapat pada tahun 1989 melalui SK. Menteri Kehutanan No.076/Kpts-II/89. Usaha perkebunan di Asiki, Distrik Jair mulai dibuka tahun 1997 dengan luas Hak Guna Usaha (HGU) 14.461 ha, yang telah dibuka seluas 13.300 Ha yang ditanami seluas 8.300 Ha dengan jumlah tanaman sebanyak 1.120.500, sementara yang sudah berbuah sebanyak 720.529 pohon sampai dengan tahun 2002. Pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit (CPO) pada bulan November 2002 dengan kapasitas pengolahan 45 ton/jam atau 450 ton/hari.

3.3. PT Korindo Abadi

Bergerak dibidang usaha formalin dan bidang usaha plywood berdasarkan SP Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM No. 11/IV/PMA/1981 tanggal 23 April 1981. Perkembangan industri plywood dari Januari sampai dengan Agustus 2003 mencapai produksi 39.228 m³, dengan volume ekspor mencapai 38.573 m³ dengan nilai ekspor US\$ 10.111.914.

3.4. PT Pelayanan Korindo

Bergerak dibidang pengangkutan barang untuk wilayah lokal. Misalnya pengangkutan spare part, hasil hutan, hasil kebun ke pabrik. Termasuk juga untuk transportasi air yang mengangkut orang dari satu wilayah ke wilayah lain untuk kepentingan perusahaan. Untuk eksport atau pengangkutan hasil produksi tidak menggunakan PT Pelayanan Korindo, melainkan memanfaatkan perusahaan cargo.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)²⁴

Pembinaan masyarakat hutan Desa (PMDH) adalah kewajiban perusahaan kepada masyarakat seperti yang diatur dalam SK Menteri kehutanan No. 523/kpts-II/1997 pasal 5 (1) tentang kewajiban para pemegang Hak Pengusahaan hutan dan hak Pengusahaan Tanaman Industri (HPH/HPHTI) untuk melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat desa huta (PMDH).

Ketentuan biaya PMDH dihitung berdasarkan besarnya produksi kayu bulat pada RKT (Rencana Karya Tahunan). Ketentuan mengenai biaya yang dikeluarkan diatur dalam SK Menkehut No. 165/kpts-II/1998 tentang biaya satuan PMDH bagi pemegang hak HPH/HPHTI. Pemberian bantuan kepada desa yang masuk pada program ini sebesar Rp. 50.000.000/tahun yang diberikan dalam bentuk fisik seperti; rumah, jhonson, gereja, dll. Rencana program dibuat melalui rapat dengan aparat desa, distrik, keamanan lokal (Koramil dan Polsek) dan tokoh masyarakat desa setempat. Masyarakat membuat daftar apa saja yang dibutuhkan oleh desanya, kemudian perusahaan akan menyediakan kebutuhan atau bahan untuk pembangunan. Demikian juga halnya dengan biaya yang harus dikeluarkan, dari total biaya apabila lebih dari 50.000.000, maka masyarakat juga diwajibkan untuk menutup kelebihan biaya.

Berdasarkan laporan program PMDH dari Korindo diperoleh data bahwa dalam program ini fokus perusahaan lebih pada bidang ekonomi, pendidikan, perumahan, agama dan kepercayaan, kesehatan, serta transportasi. Program PMDH ini dilaksanakan di

- Kampung Butiptiri Distrik Jair, Kab. Boven Digoel
- Kampung Anggari Distrik jair, Kab. Boven Digoel
- Kampung Persatuan Distrik Mandobo, Kab. Boven Digoel
- Kampung Mawan Distrik Mandobo, Kab. Boven Digoel
- Kampung Anggamburan Distrik Mandobo, Kab. Boven Digoel

Program ekonomi yang pernah dijalankan berupa pelatihan pertanian, kelompok usaha ikan asin, kelompok usaha ikan segar, kelompok usaha kebun, dan peternakan. Program pendidikan yang dilaksanakan berupa, pembangunan 1 unit SD di kampung Butiptiri dan kampung anggai, 3 SD dan 1 SLTP di Kampung Persatuan, di Kota Distrik Mandobo serta Kampung Mawan terdapat 1 SD. Selain pembangunan fisik untuk pendidikan, perusahaan juga memberikan beasiswa kepada pelajar, pengadaan tenaga pengajar, dan perumahan bagi guru. Pembangunan tempat ibadah dan sarana kesehatan juga dilaksanakan di Kampung Anggai, kampung Persatuan Distrik Mandobo, Kampung mawan, Tanah merah. Selain itu juga perusahaan membangun sarana dan prasarana transportasi di daerah binaannya.

²⁴ laporan PMDH PT. TSE dan BMO tahun 2003

Sedangkan menurut informasi dari masyarakat sekitar Getentiri, program PMDH tidak berjalan semanis apa yang dikatakan perusahaan. Pembangunan perumahan yang pada tahun 2002 berupa rumah tinggal yang sudah 100% siap tinggal, pada tahun 2003 kemudian berubah menjadi hanya bahan material pembangunan rumah saja. Perumahan yang dibangunpun tidak memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Beasiswa pun hampir tidak ada pelajar lokal yang pernah memperoleh beasiswa dari perusahaan. Program pelatihan pertanian yang dilaksanakanpun seringkali tidak melihat kecocokan dengan budaya setempat. Seperti halnya dengan program pelatihan penanaman padi yang sehabis pelatihan tidak ditindak lanjuti oleh masyarakat. Konsekwensi ini terjadi karena masyarakat lokal mempunyai makanan pokok sagu yang mudah ditanam dan tidak membutuhkan perawatan pra panen, ini berbeda dengan penanaman padi yang harus melalui Proses panjang dalam membajak, pembibitan, pemupukan hingga penyemprotan anti hama.

Dana dan pembangunan yang dilaksanakan di tiap kampung dengan hasil hutan yang telah diambil oleh perusahaan sangat tidak sebanding. Pembayaran kubikasi berdasarkan peraturan pemerintah SK Gubernur adalah sebesar 10.000/m³ yang dibayarkan 2x setiap tahunnya. Namun perolehan kayu di tiap kampung tidak pernah dilaporkan, sehingga masyarakat tidak pernah mengetahui hasil hutannya. Dengan perolehan yang demikian banyak tanpa diketahui masyarakat, menyebabkan masyarakat juga tidak mengetahui hak yang seharusnya mereka peroleh.

Idealnya ada program bagi hasil antara apa yang diperoleh perusahaan dengan hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat sekitar. Sementara masyarakat tidak mengetahui mekanismenya, kontrol aparat pemerintah terhadap perusahaan juga sangat longgar. Pembelian/penyewaan tanah ulayat yang dilakukan perusahaan tidak pernah transparan, dan dilakukan secara gerilya ke marga-marga pemilik tanah. Tanah ulayat sebenarnya merupakan milik satu suku atau marga tertentu, namun karena suku-suku yang ada tidak terorganisir maka perusahaan dengan mudah dapat memecah belah antar suku untuk keuntungannya sendiri.

Namun menurut perusahaan, merekapun kesulitan dalam hal pembayaran hasil hutan yang diambil karena dalam satu wilayah terkadang ada lebih dari seorang yang mengaku sebagai pemegang hak ulayat tanah tersebut. Dalam hal ini perusahaan akan memilih yang – menurut perusahaan- paling berhak.

5. Peluang Bisnis di wilayah Boven Digoel

Diwilayah ini banyak terdapat SDA yang dapat dikembangkan dan menjadi peluang bisnis. Sumber daya alam yang terdapat diwilayah ini antara lain tanah Luas yang belum digarap, hasil hutan seperti kayu dan kulit gambir, Sumur Minyak yang belum di eksploitasi, serta beberapa hewan yang sesungguhnya dilindungi seperti kulit buaya, arwana, dan rusa/ tanduk rusa. Karena sumber daya alam yang berlimpah itulah, Pemerintahan Kabupaten

Merauke, melakukan pemetaan guna mendapatkan investasi di bidang, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, Industri, pertambangan dan pariwisata²⁵.

Pada sektor Perkebunan, yang akan diperluas adalah sektor perkebunan Sawit di Jair dan Mindiptana. Di distrik Jair dari 221.250 Ha lahan potensial untuk perkebunan, baru 8.817 Ha. yang dimanfaatkan, didistrik Mindiptana dari 11.250 Ha. lahan potensial, baru 1.117 Ha. yang dimanfaatkan dan di Mandobo dari 72.500 Ha, lahan potensial baru 414 Ha. yang dimanfaatkan. Untuk daerah waropko, potensi lahan belum terdata, namun disana juga akan terkena perluasan perkebunan sawit. Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

LUAS BESARAN POTENSI LAHAN 2002 ²⁶				
No.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Potensi lahahan (Ha)	Luas Areal (Ha)
6.	Jair	5.723	221.250	8.817
7.	Mindiptana	4.852	11.250	1.117
8.	Mandobo	6.551	72.500	414
9.	Waropko	3.385	-	78

Pada sektor peternakan (sapi) peluang investasi dimungkinkan pada wilayah Mandobo, lahan yang tersedia adalah 2.338 Ha dengan daya dukung 1.683 ST, dan populasi ternak sebanyak 266,50 ST dengan demikian prospek pengembangan masih terbuka sebesar 1.416,50 ST. (pengembangan ranch peternakan sapi)²⁷. Sedangkan pada sektor kehutanan, hasil hutan berupa kayu, dikuasai oleh PT. Korindo Group, seperti diuraikan diatas.

Jarak dari pusat kota (Merauke) dari wilayah ini menyebabkan tingginya harga barang konsumsi masyarakat. Sehingga pedagang memiliki hak untuk mematok harga yang tinggi untuk barang-barang yang mereka jual. Sulitnya transportasi dan tingginya biaya distribusi merupakan alasan yang dipakai untuk menaikkan harga hingga mencapai 2 kali lipat dari harga di Merauke. Masyarakat biasanya tidak menolak harga-harga yang telah dipatok oleh pedagang karena memang tidak ada pilihan lain.

²⁵ Potensi dan Peluang Investasi, opcit, hal.16-37

²⁶ ibid hal 21

²⁷ ibid

Bab III

Aparat Keamanan dan OPM

1. Profil Aparat Keamanan

1.1. Sejarah keterlibatan militer

Sejak Papua Barat (Irianjaya/Papua) dinyatakan sebagai bagian dari Republik Indonesia, propinsi ini tidak pernah bebas dari cap sebagai daerah konflik. Gangguan keamanan dari kelompok yang menginginkan kemerdekaan (OPM) selalu menjadi sebab dan alasan keberadaan pos-pos tentara di tanah Papua. Terlebih sebagai propinsi paling timur wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Papua New Guinie (PNG).

Pada tahun 1984 gejolak politik di Papua semakin memanas. Operasi militer di Wamena membawa dampak untuk Papua Selatan. Sebagian besar anggota OPM Wamena melarikan diri ke wilayah Mindiptana dan menghasut masyarakat sekitar wilayah Muyu utara dan selatan. Didukung oleh krisis ekonomi dan pembiaran pembangunan, memudahkan masyarakat mengikuti kemauan OPM dari pegunungan Wamena. Mereka menawarkan suatu kemerdekaan untuk Papua asalkan masyarakat harus mengungsi ke wilayah PNG. OPM Wamena tidak segan-segan melakukan paksaan terhadap warga untuk bergabung dengan kelompok mereka bahkan merekayasa suatu peristiwa sehingga memancing kemarahan TNI. Peristiwa pembunuhan terhadap anggota koramil Mindiptana merupakan isu yang menakutkan masyarakat sehingga terjadi pengungsian secara besar-besaran. Akibat pengungsian tersebut maka kampung-kampung sepanjang perbatasan menjadi kosong. Sebagian masyarakat yang tidak mengungsi dipanggil dan diinterogasi oleh pihak TNI. Peristiwa ini mendatangkan dampak yang sangat serius bagi masyarakat sebab bagi siapa saja yang tinggal dikampung perbatasan akan menjadi incaran OPM dan TNI.

Masyarakat yang mengalami trauma akibat operasi militer dan ancaman OPM mengungsi ke PNG, sehingga kampung menjadi kosong. Hingga penelitian ini dilakukan, sebagian warga masih mengalami trauma untuk kembali kewilayah RI.

Pos-pos tentara di Perbatasan didirikan dalam upaya untuk menangkap OPM, namun daerah hutan yang luas dan pola gerilya yang dilakukan oleh OPM, menyebabkan

pengejaran sulit dilakukan dan sehingga tentara biasanya adalah menunggu laporan tentang masuknya OPM kedesa-desa. Ketika laporan diterima maka tentara akan memanggil kepala desa/dusun dan menanyai siapa saja yang menerima kedatangan ataupun memberi makan kepada OPM dan pada saat introgasi inilah sering terjadi kekerasan terhadap masyarakat karena dituduh sebagai OPM ataupun membantu OPM. Paling tidak ini berlaku hingga akhir tahun 80-an²⁸.

Penempatan aparat keamanan di lokasi perusahaan, bermula sejak masuknya perusahaan kedaerah ini, dan semakin banyak konflik perusahaan dengan masyarakat maka semakin banyak pula dibutuhkan pihak aparat keamanan.

1.2. Penempatan Pasukan Kostrad

Pasukan Kostrad di Merauke didatangkan dari batalyon-batalyon luar daerah yang selalu diganti setiap tahunnya, pengantian pasukan biasa terjadi pada bulan oktober. Penempatan pasukan disebar di pos-pos sepanjang jalan Trans Irian; Pos Sota, Pos KWEL, Pos Wanggu/erambu, Pos Muting empat dan lima pos diwilayah transmigran yaitu Pos Torasi, Pos Jagebab, Sermayam, Semangga, Pos Muramsari, SP II Tanah Miring di Kurik dan 3 pos diwilayah perusahaan yaitu pos Asiki, Pos di KM Tunas dan Pos BMO, serta dua pos di perbatasan paling selatan yaitu pos Nasem dan Kondo.

Tugas utama penempatan pasukan ini adalah mengontrol, mencatat mobil-mobil dan penumpangnya yang lewat. Dalam perjalanan dari Merauke ke Asiki, mobil harus melewati paling tidak empat pos dan setelah masuk wilayah Asiki mobil masih harus mengunjungi tiga pos yang berada di Asiki yaitu Pos Kostrad, Pos Polsek dan Pos Koramil. Setiap penumpang harus mempunyai surat jalan ataupun tanda pengenal seperti KTP, mengumpulkannya pada sopir dan sopir akan menyerahkannya kepada aparat di pos-pos bersama sebungkus rokok surya.

Setahun belakangan pos-pos ini punya perilaku “agak mendingan” dalam arti tidak terlalu dan mempersulit kendaraan yang lewat. Perilaku kekerasan saat pemeriksaan juga berkurang, ini berbeda dengan perilaku yang ditunjukkan oleh pasukan dari Patimura yang kerap melakukan kekerasan.

Batalyon-batalyon yang pernah ditempatkan mempunyai karakter dan perilaku yang berbeda-beda dari sudut pandang masyarakat, kalimat yang muncul adalah: “kalau sekarang mending, tidak seperti batalyon Patimura” jika ditanyakan tentang perilaku brutal dan arogan Aparat. Atau “tidak seperti batalyon hasanudin” jika ditanyakan tentang bisnis-bisnis yang dilakukan aparat.

²⁸ wawancara dengan tokoh agama di Boven Digoel, 23 Maret 2004.

Batalyon Hasanuddin (2000-2001)

Batalyon Hasanudin adalah pasukan yang bermarkas di Makasar.

Pasukan pada batalyon ini mendapat kebebasan dari komandan untuk berdagang, memasok barang-barang ke Asiki. Secara umum, harga barang di Asiki dua kali lipat dari harga normal. Mulai dari bumbu dapur seperti bawang, sayuran, pakaian hingga Miras. Untuk yang terakhir, bila terjadi keributan karena miras, maka anggota juga yang akan menindaknya, peristiwa pemukulan paling sering dialami oleh masyarakat yang mabok karena miras yang dijual oleh Anggota²⁹.

Batalyon Infantri Masariku 733 Patimura (2001-2002)

Battalyon Infantri (Yonif) 733 Patimura, adalah batalyon kostrad yang berasal dari Ambon, Maluku yang berada dalam teritorial Kodam Patimura Ambon.

Anggota batalyon 733 Patimura datang ke Merauke-Papua justru pada saat Ambon bergejolak. Banyak anggota batalyon ini datang dengan membawa luka dan trauma dengan konflik di Ambon. Sebagian besar anggota batalyon menyimpan dendam yang tak terperikan. Pemandangan kekerasan yang mereka saksikan di daerah konflik Ambon sangat kontras dengan kondisi keamanan di Papua khususnya perbatasan. Ketika di Ambon mereka dapat berhadapan dengan musuh yang nyata kelihatan, tetapi di Papua mereka tidak menyaksikan musuh yang nyata. Musuh mereka, yakni memendam gejolak emosi, kesepian tanpa hiburan, pikiran tentang nasib hidup keluarga mereka di Ambon. Maka secara psikologis, penugasan mereka di Papua mempengaruhi perilaku atau tindakan terhadap masyarakat. Batalyon ini banyak membuat pelanggaran, yakni:

- Kasus perkosaan terhadap perempuan dan pelecehan seksual
- Penahanan hasil-hasil masyarakat yang melewati pos-pos berupa: ikan arwana, tanduk rusa, kulit buaya.
- Bisnis militer di beberapa pos: membeli dan menjual hasil, menekan harga yang merugikan masyarakat.
- Menjual Miras serta mengatur perdagangannya.
- Terlibat dengan kasus-kasus kekerasan: penganiyaan jika tidak melapor, penyiksaan diluar prosedur hukum
- Mengambil alih tugas aparat desa, menghukum masyarakat dalam kasus kriminal
- Terjadi kasus pembunuhan di Pos Kanggawot, Mindiptana.

Joe A.Weni, salah seorang anggota masyarakat Sota, Merauke, pernah mengalami intimidasi dari anggota Satgas Yonif Patimura pada 10 September 2002. Saat itu Joe A. Weni membawa tanduk rusa yang akan dijualnya, namun ia ditodong oleh Praka Burhan, anggota Yonif 733 Patimura dengan maksud agar ia menjualnya pada praka terset. Akhirnya Joe dengan

²⁹ Wawancara dengan masyarakat pada 9 Maret 2004

berat hati menjual tanduk rusa miliknya (10 kg tanduk warna putih dan 10 kg tanduk warna Hitam) dengan harga yang rendah sebesar Rp. 300.000,-³⁰.

Kasus pelanggaran juga banyak terjadi di Perusahaan Asiki berupa: pelecehan seksual dan perkosaan terhadap beberapa perempuan bahkan mengganggu asrama putri (mess karyawan putri), penyitaan dan perampasan hasil-hasil masyarakat, menjadi pengedar miras dan bahkan sering membuat suasana menegangkan dengan melepaskan tembakan, bahkan sering terjadi pemaksaan terhadap pihak perusahaan untuk mendapatkan biaya tambahan.

Ketika batalyon Patimura ditarik dari pos-pos sepanjang perbatasan, Bapak Bupati Kab. Merauke memberikan pernyataan pada kata sambutan saat pelepasan dengan berkata: "Batalyon ini adalah pembuat banyak pelanggaran" Dan ada kasus perkosaan yang terpaksa batalyon ini membayar denda kepada keluarga korban sebesar: 'sebelas juta' rupiah. Mereka lebih suka membayar denda dari pada diajukan ke pengadilan.

Batalyon Yonif 623/BWU (Bhakti Wira Utama) Kalimantan (2003)

Yonif 623/BWU merupakan bagian dari prajurit Pangdam VI Tanjungpura, bertugas sekitar satu tahun hingga Oktober 2003 .

Kehadiran batalyon dari kalimantan membawa kesejukan bagi masyarakat. Eskalasi kekerasan di pos-pos perbatasan berkurang. Pengalaman batalyon sebelumnya yang membawa trauma masyarakat membawa pelajaran bagi batalyon dari Kalimantan. Kehadiran batalyon ini nampaknya membawa suasana baru di antara masyarakat pos perbatasan. Meski kasus kekerasan berkurang bahkan diminimalkan tapi bisnis militer tetap berjalan dengan membeli kulit kayu gambir untuk dikirim ke Jawa. Beratus-ratus ton kulit gambir dikirim ke Jawa yang menurut informasi digunakan untuk ramuan obat dan obat nyamuk.

Batalyon Infantri (Yonif) 631 Antang Palangkaraya Kalimantan Tengah (2004)

Yonif 631 Antang Palangkaraya merupakan bagian dari prajurit Pangda VI Tanjungpura, di kirim ke papua menggantikan Yonif 623 sekitar bulan Oktober 2003 .

Anggota Batalyon ini mengambil langkah pendekatan keamanan seperti batalyon sebelumnya, berusaha menghindari kekerasan tapi tetap waspada dengan kelompok separatis. Oleh karena besar kewaspadaan mereka maka di setiap pos-pos yang dilewati tetap kondisi waspada, apalagi penugasan mereka berhadapan dengan agenda Pemilu. Pemeriksaan di setiap pos perbatasan diperketat. Anggota batalyon ini juga tetap terlibat dengan bisnis di seputar perusahaan, bahkan memperlancar miras secara diam-diam.

³⁰ laporan SKP atas Peristiwa pemukulan terhadap Vincensius Ndiken

Selain itu hingga saat ini, bisnis kulit gambir juga diteruskan, proses pengambilan kulit gambir dikerjakan oleh masyarakat. Mulai dari mengupas, memotong menjadi kecil dan menjemurnya. Kemudian dijual dengan harga Rp. 300,-/kg³¹.

Kopassus

Pada tahun 1999-2002 komando pasukan khusus ini ditempatkan di Papua dengan agenda khusus. Aktivitas Kopassus di kota Merauke dan pos-pos perbatasan dimaksudkan untuk memantau perkembangan politik sehubungan dengan aspirasi Papua. Kopassus juga membuka pos di Asiki dalam areal wilayah perusahaan Korindo. Strategi kopassus menyangkut penggalangan dan klandestine, merangkul masyarakat, mereka menjadi bagian dari arus aspirasi, mengikuti seluk-beluk gerakan aspirasi. Kekuatan dan kelemahan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat dipantau dan kalau perlu dibangkitkan semangatnya untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang. Mereka dapat bertindak sebagai penonton atau juga pemain atas situasi yang terjadi. Mereka sangat dekat dengan orang-orang yang mempengaruhi masyarakat. Kopassus ini mengikuti secara dekat strategi TPN/OPM, Presidium Papua dan satgas yang membawa penafsiran beragam masyarakat. Kopassus di Merauke berada dibawah satgas Tribuana yang bemarkas di Hamadi Jaya Pura.

Keberadaan Satgas Kopassus di Papua ini, meski resminya BKO, keberadaannya seperti reguler, karena selalu ada di Papua, hanya nama Satgasnya saja yang berganti-ganti. Dalam jangka waktu lama pernah bernama Tim Maleo, kemudian Satgas Tribuana, dan berganti nama lagi menjadi Satgas Cenderawasih. Dalam kondisi tertentu biasanya akan diperkuat Detasemen Sandi Yudha dari Grup 3. Perbedaan anggota kopassus diluar dari yang bemarkas di Papua ini dapat terlihat pada operasi-operasi khusus, seperti yang terjadi ketika pembunuhan Wiliem Onde dimana ada seorang anggota Kopassus yang bertugas di Jakarta tiba-tiba muncul di pedalaman Asikie ataupun pada malam pembunuhan Thyes dimana banyak orang-orang yang tidak dikenal sebagai anggota yang bemarkas di Hamadi, terlihat dimarkas Hamadi.

2. Bisnis Militer

2.1 Distrik Mindiptana

Bisnis militer yang ada dan diketahui oleh masyarakat di wilayah Mindiptana adalah bisnis kulit buaya di wilayah Asiki, dan penjualan bulu burung cendrawasih maupun burung cendrawasih secara illegal yang saat itu dilakukan oleh Kostrad. Penjualan minuman keras juga terlihat sangat mencolok, hal ini dapat terlihat dengan makin maraknya minuman keras dan ganja seiring dengan kedatangan aparat keamanan yang membuka pos perbatasan³². Pasukan yang pertama kali membawa ganja ke wilayah ini adalah pasukan

³¹ wawancara dengan anggota masyarakat Getentiri, 22 maret 2004

³² wawancara dengan Ct, tinggal di Mindiptana, 16 Maret 2004.

Hasanuddin (2000-2001) dari Ujung pandang yang membawa bibit ganja, kemudian ditanam. Saat awal panen, ganja tersebut hanya digunakan sendiri, lama kelamaan dibagikan kepada anak-anak di wilayah sekitar.

Bisnis yang dilakukan oleh aparat militer sudah dalam tahap meresahkan masyarakat. Bisnis yang dilakukan adalah bisnis penjualan minuman keras dan obat-obatan serta ganja. Biasanya yang menjadi korban adalah anak muda di wilayah ini. Awalnya mereka tidak mengetahui mengenai ganja maupun penyalahgunaan obat, sampai masuk pasukan ke wilayah yang kemudian aparat “mengajarkan” untuk meminum obat dalam jumlah besar yang mengakibatkan si peminum menjadi mabuk, obat-obatan dalam jumlah besar tersebut awalnya diberikan secara gratis. Setelah mengetahui hal itu baru si korban kemudian mencoba lagi dan mencari obat dengan membeli³³.

2.2 Distrik Getentiri

Di getentiri tidak ada pos keamanan sama sekali, seluruh aparat keamanan dipusatkan di wilayah Asiki. Untuk “biaya keamanan” anggota biasa menerima 150.000/bulan, komandan 250.000/bulan dari perusahaan yang diberikan kepada pos-pos bataliyon, koramil satgas dan polisi³⁴.

Selain menerima “uang keamanan” aparat keamanan yang bertugas juga melakukan bisnis berupa penjualan minuman keras, kulit buaya, ikan arwana dan kulit gambir. Bisnis dilakukan secara perorangan, salah satunya adalah dari oknum dari bataliyon 733, yang kemudian oknum tersebut hilang bersamaan dengan digantinya bataliyon yang bertugas³⁵.

Wilayah ini memiliki sangat banyak SDA yang menjanjikan sehingga banyak kepentingan yang bermain disini. Setiap perusahaan selalu membutuhkan pihak keamanan, sehingga biasanya adanya proyek baru dalam perusahaan atau munculnya perusahaan baru selalu diiringi dengan bertambahnya aparat keamanan yang bertugas. Sumber-sumber aparat bisa hidup diantaranya dari APBD/N, perusahaan milik TNI juga banyak, yayasan-yayasan, sumber-sumber lain secara legal dan ilegal (misalnya backing prostitusi, melancarkan miras dan narkoba). SDA terpendam di daerah konflik biasanya menjadi pusat bisnis aparat keamanan. Demikian pula kediran aparat keamanan di daerah papua³⁶.

Bisnis militer yang banyak terjadi di wilayah ini, umumnya berhubungan dengan eksploitasi SDA, yang berupa penjualan kulit gambir yang kemudian dijual ke Jawa, penjualan kulit buaya, tanduk rusa, dan ikan arwana. Bisnis yang dijalankan tidak jarang menggunakan fasilitas milik TNI yang bertugas, fasilitas yang digunakan tentunya berupa alat transportasi dimana memang sarana transportasi selain sangat mahal juga sangat jarang. Bisnis yang

³³ Fr. J, tinggal di Mindiptana, 16 Maret 2004.

³⁴ Zs, Caleg salah satu partai peserta pemilu, 2004.

³⁵ ibid

³⁶ JM, tinggal di Merauke, 25 Maret 2004.

dilakukan ini kemudian dilegalkan karena pasukan yang bertugas diperkenankan untuk memperoleh perbekalan secara swadaya³⁷.

Selain bisnis “pengusahaan perbekalan secara swadaya”, tiap bulan batalyon yang bertugas menerima kontribusi keamanan dari beberapa perusahaan di wilayah merauke yang biasa disebut Pemasukan dana non dinas antara lain berasal dari³⁸ :

- | | | |
|-------------------|-----|---------------------|
| a. PEMDA | Rp. | 350.000,- /bulan, |
| b. CV. Buana | Rp. | 200.000,- /bulan, |
| c. CV. Tunas Jaya | Rp. | 100.000,- /bulan, |
| d. Toko sulawesi | Rp. | 100.000,- /bulan. |
| e. KORINDO | Rp. | 1.500.000,- /bulan. |

Khusus wilayah Asiki, tiap bulannya komandan dari seluruh petugas keamanan yang ada menerima Rp. 250.000/orang, sementara anggota menerima Rp. 100.000/orang dari PT Korindo Group, namun tidak jelas kemudian apa timbal balik yang harus diberikan kepada perusahaan³⁹.

Selain pemasukan dana non dinas, tiap batalyon juga menerima Logistik bantuan wilayah yang berupa:

- | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| a. PEMDA | Premium ± 120 liter/ | bulan |
| b. Pertamina | Premium ± 200 liter/ | bulan & Solar ± 200 liter/ |
| c. Sub Dolog | beras ± 2 - 3 karung/ | bulan |

3. TPN/OPM Wiliem Onda

Organisasi Papua Merdeka (OPM) memiliki beberapa faksi atau daerah operasi dimana kelompok OPM tersebut berada. Untuk wilayah Merauke, terdapat OPM yang dikomandani oleh Wiliem Onda.

Sebelum Tahun 1997 aktifitas Wiliem Onda tidak banyak diketahui, namanya pun baru sering terdengar justru paska penyerahan dirinya ke pangkuan NKRI.

Pada 5 Mei 1997, diadakan upacara perdamaian antara OPM dan TNI di Gedung Masyarakat Samosir, di Mindiptanah (jaraknya ke Merauke 498,835 Kilometer). Saat itu hadir para pejabat sipil, pejabat militer, dan Uskup Agung Merauke, Mgr. Jacobus Duivenvoorde, MSC menyaksikan acara tersebut. Pada acara itu, seekor ayam putih disembelih. Setetes darahnya diambil oleh Komandan Yonif 515/KOSTRAD dan menyekanya pada telapak tangan Willem Onda, kemudian Willem Onda pun melakukan hal yang sama kepada Komandan Yonif 515/KOSTRAD. Lalu keduanya berjabat tangan sambil Uskup Agung

³⁷ ibid

³⁸ wawancara dengan AM, tinggal di Merauke, 26 Maret 2004.

³⁹ wawancara dengan Andi, Getentiri, Distrik Jair, 22 Maret 2004.

Merauke memberkati dan berkata: “*hentikanlah pertumpahan darah dan carilah jalan damai untuk mengakhiri peperangan ini*”. Dengan demikian persoalan diantara kelompok TPN/OPM pimpinan Willem Onde dengan TNI dianggap selesai.

Pada 21 Mei 1997, Willem Onde bersama 56 orang anak buahnya turun dari hutan dan menyerahkan 46 pucuk senjata jenis *engkelop*⁴⁰ dan sisa *Perang Dunia II* serta sejumlah amunisi. Mereka ingin tinggal bersama saudara-saudara yang lain di Mindiptana. Pertemuan dengan Bupati dilaksanakan di Balai Pertemuan, Mindiptana. Ketika itu Willem Onde dan anak buahnya dijemput di *camp* mereka oleh Dan Yonif 515/KOSTRAD, Mayor Inf. Bambang Sugiharto. Kebanyakan anak buah Willem yang turun itu berasal dari Desa Kombut, Kecamatan Mindiptanah. Usia mereka berkisar 17 - 42 tahun⁴¹.

3. 1. Aktifitas OPM Paska Penyeran diri.⁴²

3.1.1 Tahun 1999: Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat

1 Desember 1999 Sebagai Komandan Operasi Umum OPM, Kolonel Willem Onde menginstruksikan kepada seluruh lapisan masyarakat Papua Barat untuk menaikkan Bendera Bintang Kejora selaku Bendera Nasional *West Papua*. Seruan ini juga disampaikan kepada Presiden dan tembusannya dikirim kepada Gubernur, Pangdam, Bupati, Dandim, Kapolres, Camat, Kapolsek, Koramil, Kepala Desa, Kepala Suku se Irian Jaya. Menerima surat tersebut para Camat di Kabupaten Merauke saat itu kebingungan bagaimana sebaiknya menyikapi surat Willem Onde tersebut.

20 Nopember 1999 Sebagai tanggapan atas seruan Willem Onde itu, maka pada **Bupati Merauke** Drs. Johannes Gluba Gebze mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di Kantor Bupati, Jalan Brawijaya untuk membicarakan surat dari Willem Onde tersebut. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa petunjuk bagi para Camat, yaitu:

1. Pemerintah Daerah mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora pada tanggal 1 Desember.
2. Dalam pengibaran bendera Bintang Kejora harus tetap memegang teguh untuk menjaga keamanan, kedamaian dan ketertiban umum.
3. Bendera Bintang Kejora dikibarkan di luar lingkungan kantor instansi pemerintah, angkatan bersenjata, rumah sakit, dan rumah ibadah.
4. Masyarakat dilarang menurunkan bendera Merah Putih.
5. Tidak boleh ada pemaksaan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora bagi yang tidak mau.
6. Bupati masih mempertimbangkan permintaan ijin pengibaran bendera Bintang Kejora bersama-sama dengan bendera Merah Putih.⁴³

⁴⁰ Engkelop ialah jenis senjata laras panjang

⁴¹ Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos, 24 Mei 1997

⁴² Kumpulan informasi seputar dugaan tewasnya Willem Onde, SKP-KAM, Oktober 2001

3.1.2 Tahun 2000 : Ingin Memisahkan Diri dari Republik Indonesia

1 Januari 2000, Agus Runtuboy *West Papua The Military Executive Council* (Dewan Tertinggi Militer) atas nama seluruh masyarakat Papua Barat mengeluarkan sebuah surat pernyataan sikap⁴⁴ kepada Presiden RI K.H.Abdurrahman Wahid. Pernyataan sikap yang dibuat di Port Numbay, PNG memuat beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Seluruh masyarakat Papua Barat menyatakan: memutuskan/memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyerahan kekuasaan supaya dilaksanakan di bawah pengawasan PBB.
3. Seluruh kekuatan TNI dan POLRI di seluruh wilayah Papua Barat ditarik mundur agar tidak lagi terjadi pembunuhan, penangkapan, penahanan, pengungsian, pembumihangusan yang merugikan umat manusia.
4. Sehubungan dengan penyerahan kedaulatan rakyat Papua Barat, Indonesia diminta menuju meja perundingan di bawah pengawasan langsung PBB.
5. Pernyataan Sikap Rakyat Papua dibuat berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara hukum internasional.

12 Agustus 2000 sekitar pk. 09.30 di Asiki, kepada Tim Sosialisasi Panel Merauke yang dipimpin Yustus Wafum, Willem Onde menyatakan ketidak setujuannya terhadap elit-elit politik dan tokoh-tokoh politik Papua yang berada di Merauke. Kepada Tim Sosialisasi Panel Merauke Ia mengatakan bahwa, " *Tim kalau kembali ke Merauke nanti tolong sampaikan dan beritahukan kepada Yanuarius Wiwaron, Pieter Tiniyap, Songmen, Tinus Torip, Wim Katukdoan, dan Frans Kamepits bahwa, segera tempo merubah sistem dalam 5 menit. Kalau mereka tidak rubah sistim, maka saya akan adakan kudeta, yaitu TPN akan babat itu sipil dan elit-elit politik yang ada dalam kota Merauke supaya sebelum memasuki kemerdekaan Papua, sebelumnya basmikan dulu yang bikin kotor perjuangan Papua....* ". Pada saat itu Ia bahkan menyampaikan juga niatnya untuk membongkar posko-posko Satgas Papua yang ada di Kota Merauke. " *Bulan Februari 2000 yang lalu saya sudah suruh TNI dan Polisi serta Brimob supaya bongkar posko-posko Satgas Papua di Merauke. Karena Satgas telah merusak perjuangan Papua. Tetapi untung Pak Dandim tidak setuju. Pak Dandim bilang nanti masyarakat kira ini rencana TNI-AD. Akhirnya tidak jadi bongkar* ".⁴⁵

⁴³ Informasi Pertemuan di Kantor Bupati, Sabtu, 20 November 1999, jam 08.40 s/d 10.46. Pertemuan itu dihadiri 28 orang peserta. Bapak Alo Bambang merupakan salah satu peserta mewakili unsur tokoh agama Katolik dalam pertemuan itu kemudian menulis beberapa kesepakatan tersebut.

⁴⁴ Pernyataan Sikap Seluruh Rakyat Papua Barat tertanggal 1 Januari 2000.

⁴⁵ Pernyataan tersebut disampaikan kepada Yustus Wafum, Caecelia Yermogoin, Samuel Wanggaimu, dan Hengky Sama didalam kantor pusat informasi TPN/OPM di Asiki . Atas permintaan Tim, Willem Onde kemudian menulis surat kepada Yan Wiwaron dan kemudian diserahkan kepada Yustus Wafum. dalam Kumpulan informasi seputar dugaan tewasnya Willem Onde, SKP-KAM, Oktober 2001.

3.1.3 Willem Onda menolak Otonomi Khusus⁴⁶

Ketika semua sandera dilepas oleh kelompok OPM pimpinan **Willem Onda**, masalah Otonomi Khusus (OTSUS) sedang menjadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat luas di Papua. Disatu pihak ada kelompok masyarakat Papua yang pro terhadap pelaksanaan OTSUS, tetapi dilain pihak ada kelompok masyarakat yang kontra terhadapnya. Dalam suasana pro dan kontra maka Pemerintah Propinsi Papua mengambil inisiatif untuk mengadakan Lokakarya Otonomi Khusus di Jayapura. Berkaitan dengan OTSUS itu, menurut ibu Norbertha Tayum, saat berada di Jakarta (di Hotel Betawi, tempat menginap selama di Jakarta) setelah melepaskan sandera Willem Onda pernah disodorkan beberapa surat yang harus ditandatanganinya. Salah satu diantaranya adalah surat yang berisikan persetujuannya terhadap pelaksanaan OTSUS di Papua. Namun, ia menolak menandatanganinya.⁴⁷

⁴⁶ Kumpulan informasi seputar dugaan tewasnya Willem Onda, SKP-KAM, Oktober 2001

⁴⁷ Norbertha Tayum berada dalam kamar hotel bersama Willem Onda ketika Tonny Narahawarin masuk dan membawa sejumlah surat yang harus ditandatanganinya. Menurut Nobertha, begitu melihat surat tentang persetujuannya tentang Otonomi Willem Onda sangat marah sekali. Surat itu tidak ditandatanganinya. Willem Onda hanya menandatangani surat dari pihak Korindo Group mengenai jaminan keamanan perusahaan.

Bab IV

Dinamika dan Relasi

1. Pola Hubungan TPN/OPM, aparat keamanan dan Perusahaan

Sejak Wiliem Onde keluar hutan dan berdamai (menyerahkan diri dengan menyerahkan 64 pucuk senjata), Wiliem bebas keluar masuk kota Merauke, tinggal di Asiki dan dapat keluar masuk perusahaan. Wiliem sering terlihat keluar masuk markas kopassus, berjalan bersama disepular kota Merauke, masuk bar dan sering meminta perusahaan untuk membayar hutang, sering kali Willem Onde juga minta “minum” kepada Kopassus.

Ketokohan Willem Onde memang mengundang kontroversi di antara kelompok OPM, anggota Presidium, dan Satgas. Pada tanggal 1 Desember 1999, Willem Onde menyerukan menaikkan bendera bintang kejora, tapi kemudian tahun 2000 muncul larangan dari Willem untuk tidak menaikkan bendera. Willem Onde pernah terlibat pertengkaran dengan sesama OPM, bahkan Kasus perkelahian OPM dan Satgas di Mur, kecamatan Nambai menelan korban kematian dari anggota Willem. Di Mur, kecamatan Nambai pada tahun 2000 ingin menaikkan bendera bintang kejora, tapi kemudian muncul larangan dari Willem Onde.

Willem Onde sering bersama dengan Kopassus di Lokasi perusahaan untuk ‘mengamankan’ perusahaan. Sering terjadi bahwa, apabila perusahaan menghargai jasanya atau memberikan bantuan jika Willem Onde meminta maka dia menunjukkan sikap yang simpatik, tapi kalau permintaannya tidak dikabulkan sering membuat ‘kekacauan’ dan biasaya diamankan oleh pihak Kopassus. Hubungan Willem Onde dengan Kopassus sangat mencolok, ke dua belah pihak saling mengunjungi pos, bahkan jika ada agenda-agenda khusus, Willem sering terlibat kerja sama dengan Kopassus.

Kerjasama Kopassus dengan Willem Onde sangat nampak juga dalam hal bisnis. Anak buah Willem Onde memberikan akses (jalan) bagi Kopassus untuk dapat mendekati lokasi perbatasan untuk mencari hasil-hasil: Kulit buaya, kura-kura, ikan arwana. Anak buah Willem Onde bekerja sama dengan Kopassus untuk menjual hasilnya di kota merauke.

Kelompok Willem Onde dan Kopassus memiliki kepentingan dan kekuasaan untuk dapat mencari hasil-hasil sementara orang lain tidak bisa masuk dalam wilayah operasi mereka.

Penempatan kapassus berada di: Pos kota Merauke, Pos Sota, Pos Erambu, Pos Asiki, Pos Tanah Merah. Masing-masing pos KOPASSUS menunjukkan aktivitasnya dalam dunia bisnis, hal ini nampak pada pengiriman peti kemas lewat pelabuhan Merauke maupun pelabuhan Asiki.

Walau telah menyerahkan diri, Willem tetap mempunyai anak buah (pasukan bersenjata) yang tetap dibawah komandonya dan memiliki markas di Asiki dalam wilayah perusahaan (Camp III).

Setiap bulannya perusahaan mengeluarkan uang untuk aparat keamanan, setiap bulan saat gaji, perusahaan menyerahkan sejumlah uang kepada tiap komandan. Setiap anggota mendapat sekitar 150.000/bulan dan komandan (danki) mendapat 250.000. angka ini diatas nominal yang dikeluarkan untuk pejabat sipil kecamatan sebesar 100.000 rupiah/bulan. Namun demikian kerap kali perusahaan mengeluarkan uang untuk memenuhi permintaan aparat keamanan, kapolsek, danramil, kostrad, maupun camat. Para petugas ini datang ke perusahaan untuk meminta ongkos ataupun minyak jika ingin ke Merauke, Jayapura, bahkan Jakarta, dalam posisi ini biasanya perusahaan memenuhinya.

Dalam pembicaraan dengan orang perusahaan, baik diperwakilan Merauke maupun di Asiki, pihak perusahaan tidak mengakui bahwa mereka memberi bantuan dana kepada pihak keamanan, yang diakui hanya bantuan-bantuan material berupa seng dan plywood untuk membangun pos tentara dan kantor polisi. Namun demikian juga diakui memberikan bantuan jika ada pihak aparat yang meminta untuk bepergian, ataupun perusahaan tidak dapat menolak ataupun melarang jika aparat pinjam telepon untuk interlokal.

Para nara sumber (sebagian adalah penerima) yakin bahwa mereka hanya mendapat dan memperebutkan ikan kecil saja, sedangkan ikan besarnya sudah diambil oleh Jakarta. Namun demikian mereka tidak mengetahui sama sekali biaya yang diberikan ke Jakarta untuk biaya pengamanan.

2. Militer, politik dan Bisnis Pengamanan

Penempatan Pasukan TNI di Papua bagian selatan (dalam hal ini Merauke dan Boven Digul) dimaksudkan untuk menangkap OPM, paling tidak ini berlaku sejak peristiwa 1984 saat OPM dari Wamena ditenggarai berlindung dan mencari pengaruh disana, hingga ABRI melakukan operasi penyisiran yang berakibat masyarakat sipil mengungsi.

Selain itu, di sepanjang perbatasan dengan PNG, TNI juga difungsikan sebagai penjaga perbatasan, sehingga pos-pos perbatasan didirikan. Namun demikian pos-pos tersebut tidak hanya didirikan disepanjang perbatasan, tapi juga di tengah kampung-kampung dan di

lokasi-lokasi perusahaan. Tentara pada pos yang terdapat dikampung-kampung seringkali mengganggu penduduk, meminta makan, hingga melakukan tindak kriminal pembunuhan terhadap penduduk⁴⁸. Sedangkan aparat pada pos-pos di areal perusahaan selalu mendapat uang jajan setiap bulannya dari perusahaan.

Paska penyerahan diri Wiliem Onde pada 1997, sebenarnya pos-pos TNI di areal perusahaan tidak dibutuhkan lagi. Pelanggaran keberadaan tentara dalam rangka operasi pembinaan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakjelasan operasi ini dapat dilihat dari gangguan-gangguan keamanan terhadap perusahaan tidak berkurang, karena pada dasarnya justru gangguan keamanan datang dari dua pihak ini, disamping perusahaan harus mengeluarkan biaya pengamanan untuk kedua belah pihak. Bagaimana melogikan keberadaan OPM Wiliem Onde dengan “mengizinkan” Wiliem Onde dan pasukannya memiliki senjata Api secara tidak sah.

Ada beberapa keuntungan bagi status politik dan bisnis tentara dengan membiarkan keberadaan pasukan Wiliem Onde dan segala aktifitasnya. Secara politik mempertahankan adanya gangguan keamanan berarti melanggengkan ketergantungan terhadap keberadaan pasukan, dan secara bisnis berarti tetap bertahannya sumber-sumber keuangan militer. Dalam konteks Papua tahun 1999-2001, dimana terdapat sebuah faksi sipil -PDP dan Satgas Papua- yang memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui jalur damai dan diplomasi dengan pemerintahan Jakarta, mempertahankan keberadaan Wiliem Onde dapat sebagai penyeimbang kekuatan dan politik belah bambu di praktekkan.

Pada tanggal 1 Desember 1999, Willem Onde menyerukan menaikkan bendera bintang kejora, tapi kemudian tahun 2000 muncul larangan dari Willem untuk tidak menaikkan bendera. Willem Onde pernah terlibat pertengkaran dengan sesama OPM, bahkan Kasus perkelahian OPM dan Satgas di Mur, kecamatan Nambai menelan korban kematian dari anggota Willem. Di Mur, kecamatan Nambai pada tahun 2000 ingin menaikkan bendera bintang kejora, tapi kemudian muncul larangan dari Willem Onde. Dan wiliem juga pernah menyampaikan untuk membongkar posko-posko satgas Papua.

Perselingkuhan antara OPM dan TNI juga dapat terlihat dalam tuntutan Wiliem Onde saat melakukan penyanderaan terhadap karyawan PT. Korindo, dimana salah satu tuntutannya adalah penarikan Pasukan Brimob dari Merauke. Wiliem menganggap Brimob yang datang ke Merauke tidak tahu tentang perdamaian dengan TNI dan perlakuan khusus yang didapatkannya. Dengan hadirnya brimob –terlepas bahwa anggota brimob juga banyak berlaku kasar pada penduduk- keberlangsungan bisnis antara TNI dan Wiliem dilapangan menjadi terganggu, anak buahnya ada yang diganggu Brimob⁴⁹.

⁴⁸ wawancara pada 23 Maret 2004 di Getentiri

⁴⁹ wawancara dengan tokoh agama di Getentir, pada 23 Maret 2004

Pada wilayah Perusahaan PT. Korindo Group, paling tidak terdapat tiga Pos TNI yang bertugas menjaga perusahaan. Padahal Perusahaan ini tidak termasuk dalam kategori obyek vital yang harus diamankan. Hingga 12 November 2003, paling tidak ada 16 obyek vital yang diakui diamankan oleh TNI dan dari ke-16 perusahaan tersebut PT. Korindo tidak termasuk didalamnya. Ke-16 Perusahaan tersebut adalah: PT Arun LNG, PT ExxonMobil, PLTA Sigura-gura, PT Inalum, PT Caltex Dumai, Kilang Minyak Plaju dan Gerong, PLTU Suralaya, PT Dirgantara Indonesia Bandung, Kilang Minyak Cilacap, PLTU Paiton, PLTU dan Petrokimia Gresik, PT Badak LNG Bontang, PT Vico Muara Badak, Unocal Sangata dan PT UP V Pertamina Balikpapan, PT Nikel Soroako, PT Freeport Tembaga Pura, dan PT Puspiptek Serpong⁵⁰.

PT. Korindo, adalah satu dari sekian banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa pengamanan TNI, dan ini bukanlah bisnis yang dilakukan oleh pasukan dilapangan saja, karena mereka ditugaskan langsung dari Jakarta, dimana TNI berpusat dan PT. Korindo mempunyai kantor Pusat.

Kenyataan diatas mengungkapkan makin tidak jelasnya posisi Pos-pos tentara di wilayah perusahaan. Jika sebelumnya keberadaan OPM di Merauke menjadi alasan bagi keberadaan tentara disana, maka paska tahun 1997 setelah Wiliem Onda menyerahkan diri kedalam Pangkuan Ibu Pertiwi, otomatis tidak adalagi gangguan disana, karena tidak ada kelompok OPM lain di Merauke. Apalagi paska November 2001, saat tokoh OPM tersebut telah pulang kedalam pangkuan Tuhan dan seluruh kegiatan OPM di Merauke tidak aktif lagi.

Dari data-data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peristiwa pembunuhan Wiliem Onda terjadi setelah peristiwa penyanderaan karyawan Korindo, setelah Wiliem bertemu pejabat-pejabat di Jakarta dengan difasilitasi Kopassus dan setelah Wiliem Onda melakukan penolakan terhadap Otonomi Khusus untuk Papua. Dari hasil investigasi lapangan juga diketahui adanya kesaksian bahwa Kopassus mencari-cari Wiliem Onda dan berada di TKP dihari wiliem onde terbunuh. Dan saat persidangan Pembunuhan terhadap Theys terungkap bahwa pasukan Kopassus yang bertanggungjawab atas kematian Presidium PDP Theys Hiyo Eluay, adalah pasukan yang sama, yang sebelumnya bertugas di Merauke, melakukan operasi penggalangan terhadap wiliem onde dan saat terjadinya pembunuhan terhadap Wiliem Onda. Kata pepatah "*Habis manis sepah dibuang*", maka Wiliem Onda pun tidak dibutuhkan lagi. Tidak ada pengusutan hukum terhadap kasus pembunuhannya dan tidak ada evaluasi atas operasi-operasi militer yang dijalankan di Papua.

⁵⁰ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/12/utama/684570.htm>

3. Bubarnya “Kongsi” Korindo-TNI-Willem Onde: Kasus penculikan terhadap karyawan PT Korindo⁵¹

16 Januari 2001, Willem Onde melakukan penyanderaan terhadap 16 orang karyawan Korindo Group di hutan Asiki (jarak ke Merauke 389 Kilometer). Mereka terdiri dari 3 (tiga) orang warga negara Korea dan 13 (tiga belas) warga negara Indonesia. Drama penyanderaan ini membuat pihak Korindo Group merasa kaget. Sebab, selama ini hubungan pihak Korindo Group dengan Willem Onde cukup dekat. Menurut Manager Personalia Korindo Group, Mr. Ha pihaknya selalu membantu Willem Onde apabila ia memerlukan bahan makanan, bahan bakar bensin, bahkan sering ia menggunakan fasilitas komputer untuk mengetik surat-suratnya. Keheranan yang sama juga disampaikan Kadispen Polda Papua, **Komisaris Polisi Zulkifli A. R.**: *”saya heran mengapa Willem Onde, yang kami kenal dekat dengan semua pejabat di Jayapura dan mendapat fasilitas dari PT. Korindo, melakukan hal ini”.*⁵²

Tuntutan yang diajukan oleh Willem Onde:

- 1) Penarikan pasukan Brimob dari Merauke,
- 2) Menghendaki Korindo Group, perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kayu milik Korea Selatan itu, membayar ganti rugi sebesar US \$ 1 juta kepada OPM sebagai kompensasi dari kerusakan hutan di wilayah itu,
- 3) Membayar utang-utang Willem Onde di Bar “Romantika”, Merauke sebesar Rp. 2,4 juta,
- 4) Segera dibuka kembali dialog antara TPN/OPM dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membicarakan status Papua Barat, dan
- 5) Mencabut Maklumat Kapolda Irja No. 2 Tahun 2000 tentang TPN/OPM di seluruh Irja⁵³.

Sejalan dengan terjadi peristiwa ini Kapolri, Jenderal Pol. Bimantoro memberikan tanggapan bahwa, pembebasan sandera tetap akan dilakukan melalui jalur negosiasi dengan melibatkan TNI dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Namun, menurut Kapolri bahwa tuntutan untuk menarik pasukan Brimob dan pencabutan Maklumat Kapolda Irja tidak akan dipenuhi.⁵⁴

Pada saat penyanderaan itu berlangsung, John Tumin Kandam dan istrinya Devota sedang mengikuti kursus peternakan di Getentiri yang diberikan oleh Herman Baup dari Dinas Peternakan Merauke. Mendengar bahwa Willem Onde telah menyandera karyawan Korindo Group, John Tumin Kandam lalu pergi menemui Willem Onde didalam hutan untuk memintanya menghentikan penyanderaan itu. Karena menurut John Tumin, aksi

⁵¹ Kumpulan informasi seputar dugaan tewasnya Willem Onde, SKP-KAM, Oktober 2001

⁵² Majalah Mingguan TEMPO, Edisi 22-28 Januari 2001

⁵³ Maklumat No. Pol. MAK/02/XII/2000 dikeluarkan oleh Kapolda Irja, Brigjend (Pol) S.Y. Wenas. Maklumat itu berisi larangan terhadap berbagai bentuk organisasi bersenjata yang mengarah pada tindakan sparatis, seperti TPN dan sejenisnya.

⁵⁴ Kantor Berita Antara, 26 Januari 2001

penyanderaan yang dilakukan Willem Onda itu sangat merugikan banyak orang, khususnya orang Papua. Akan tetapi Willem Onda tidak menghiraukan permintaannya bahkan saat itu Willem Onda mau menembak John Tumin Kadam.

28 Januari 2001 setelah dilakukan perundingan antara **Willem Onda** dan Tim Negosiasi yang di pimpin oleh Bupati Merauke, **Drs. Johannes Gluba Gebze**, Willem Onda melepaskan 13 orang sandernya, tetapi dengan permintaan bahwa dia bersama 10 orang anggotanya harus dipertemukan dengan Presiden RI, Abdurahman Wahid di Jakarta. Dan hal ini dipenuhi oleh Bupati Merauke yang segera akan mengatur perjalanan Willem Onda bersama 10 anggotanya ke Jakarta setelah semua sandera dibebaskan.

19 Pebruari 2001 Setelah semua sandera dilepaskan, Willem Onda beserta 10 anggotanya ke Jakarta menemui Presiden **Abdurahman Wahid**, Ketua MPR RI **Amien Rais** dan Ketua DPR RI **Akbar Tandjung** serta sejumlah pejabat sipil dan militer lainnya. Saat bertemu Akbar Tanjung di Jakarta, Willem Onda meminta agar seluruh tapol dan napol yang masih ditahan segera dibebaskan.

Drama penyanderaan ini menimbulkan banyak pertanyaan dikalangan umum karena “kedekatan” Willem Onda dengan Kopassus. Hubungan antara Willem Onda dengan Kopassus dikatakan “dekat” karena seringkali Willem Onda menginap di Markas Kopassus di Jalan PGT bila ia datang dari Asiki ke Merauke. Bahkan sering terlihat jalan bersama Kopassus. Salah satunya adalah pada tanggal 7 Januari 2001, seorang saksi sedang dalam perjalanan ke Merauke bertemu dengan Willem Onda dan Marius Marip di sekitar Kweel (Jaraknya 170,900 Kilometer dari Merauke) bersama 3 (tiga) anggota Kopassus sedang menumpang mobil. Melihat saksi tersebut, mobil langsung berhenti dan dari jendela mobil Willem Onda mengatakan kepada saksi, ” katukma (saudara laki-laki), kita tidak ada masalah”. Saat itu Willem Onda meminta saksi untuk menemuinya di Asiki. Katanya, ada sebuah pekerjaan yang harus dilaksanakan anak buahnya bersama saksi. Mayor Inf. Hendra pernah mengeluh tentang perilaku Willem Onda kepada Nico Yeem. Sebab, Willem Onda sering datang minta “minum” ke Kopassus setiap dia berada di Merauke.

Kedekatan semacam ini yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat apakah penyanderaan itu hanyalah sebuah skenario yang dibuat oleh Kopassus dan Willem Onda dengan tujuan kepentingan tertentu? Ataukah Kopassus telah gagal melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap Willem Onda? Mengenai hal yang terakhir, Pangdam XVII Trikora, **Mayjend TNI Mahidin Simbolon** mengemukakan bahwa, dengan aksi penyanderaan yang dilakukan Willem Onda tersebut bukan berarti pendekatan yang selama ini dilakukan oleh Kopassus gagal. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya pembinaan, antara lain mungkin akibat tuntutan yang tidak dipenuhi. Willem Onda membantah bahwa dirinya dibina oleh TNI. “*Bagaimana mungkin orang yang saling baku bunuh itu bisa bina membina?*”⁵⁵

⁵⁵ Wawancara Willem Onda dengan Majalah TEMPO, tanggal 21 Januari 2001.

4. Konflik Sebelum Masuknya Perusahaan

Sekitar tahun 1989, PT Bade Makmur Orisa mulai beroperasi di wilayah Getentiri, Bagian Kali Kau (pertengahan butiptiri-Getentiri), sampai di perbatasan dan bagian selatan sampai Asiki. Konflik dimulai ketika pada tanggal 26 November tahun yang sama ada pengumuman dari Camat Jair bahwa pada hari selasa sore/rabu pagi Bupati Merauke akan datang dengan rombongan untuk membicarakan hak-hak masyarakat dusun tentang dusun dalam hubungannya dengan kedatangan kapal yang membawa 20 alat berat untuk mulai mengolah kayu di wilayah tersebut. Ternyata Bupati tidak datang, dan masyarakat merasa tertipu. Akhirnya pada tanggal 28 November 1989 datang rombongan gabungan instransi pemerintah dan pengurus PT BMO yang terdiri dari:

Rombongan pemerintah:

- Kapolres dan pengikutnya
- Wakil Dandim
- Jon Rumulus⁵⁶
- 2 orang dari kantor imigrasi
- 2 orang bagian kehutanan
- 1 orang dari perwakilan bank dari jakarta
- wakil DPR, Bpk. Piet Tiniyap⁵⁷
- kepala kantor tenaga kerja

Rombongan dari PT BMO:

- Bpk. Wermasubun, mewakili direktur PT BMO
- Beberapa orang perwakilan dari PT BMO

Namun dalam pertemuan itu ketimpangan antara rombongan dari aparat pemerintah dan PT BMO dengan masyarakat sangat terasa, karena masyarakat tidak memiliki kemampuan negosiasi dan tidak “sepintar” rombongan yang datang. Dalam pertemuan dikatakan bahwa akan ada keunungan dari PT, hanya saja akan diberikan kepada kabupaten dan kecamatan untuk pembangunan kantor-kantor camat, poliklinik, sekolah dll, yang seharusnya pembangunan infrastruktur desa seperti itu menjadi tanggung jawab pemerintah.⁵⁸

Persoalan mendasar konflik antara masyarakat dengan PT BMO adalah mengenai hak ulayat dan ANDAL. Pada pernyataan sikap yang dibuat oleh masyarakat kampung Yodom, desa yodombag kecamatan Edera, masyarakat kampung Ilwayab desa Wanam kec kimaam, masyarakat kampung Nakian desa Himohi kecamatan Okaba, masyarakat kampung salamepe desa Himohi kecamatan Okaba dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak ulayat

⁵⁶ Care taker Bupati Keb. Mappi

⁵⁷ Wakil Ketua DPRD Kab. Merauke, sekarang Ketua DPRD Kab. Merauke

⁵⁸ Surat Pastor Paroki Getentiri, P. Kees de Rooij kepada Pasor Delsos, P Juliono di Keuskupan Agung Merauke (KAM), tgl 4 Desember 1989

yang nantinya akan disewakan kepada PT BMO dinyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak PT BMO yaitu;

- Tanah yang rencananya merupakan lokasi industri plywood tidak untuk diperjual belikan, sewa kontrak masih dapat dipertimbangkan
- Untuk menghindari keputusan sepihak yang meresahkan, masyarakat perlu ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan sebagai obyek pembangunan. Maka PT BMO harus mengadakan musyawarah dengan masyarakat pemilik hak ulayat atau wakil-wakil yang ditunjuk
- PT BMO harus membuat ANDAL

Kelestarian lingkungan harus tetap dilindungi karena tanah merupakan lingkungan hidup sejak leluhur masyarakat adat yang telah diatur dalam hukum adat Marind Anim yang tinggal disepanjang sungai digul. Selain itu juga tanah menjadi sangat penting karena merupakan lahan yang sangat potensial untuk pengembangan persawahan, peternakan, tanaman palawija dll⁵⁹. Selain itu diwilayah ini pohon karet tumbuh dengan sangat baik, di wilayah Getentiri sudah mulai dikembangkan bibit karet yang dapat menjadi usaha masyarakat paroki Getentiri.

Keberatan di kalangan masyarakat pada umumnya disampaikan kepada pastor paroki yang bertugas diwilayah (P. Kees de Rooij, Msc), dengan harapan pastor dapat membantu menyelesaikan persoalan mereka.

Pada awal masuknya perusahaan, ada beberapa data yang sempat dilacak oleh pihak masyarakat dan paroki, diantaranya⁶⁰:

- Konfensi hutan yang diklaim seluas 200.000 ha, untuk masa sewa selama 20 tahun.
- Kapasitas/volume kayu yang dikelola 10.000 m³/bulan
- Tenaga buruh yang diperlukan 2000 orang
- Lokasi HPH terletak di wilayah antara Butiptiri dan Getentiri
- Peralatan yang dipakai (sampai dengan 30 November 1989)
 - 9 Buldozer besar
 - 2 loder besar
 - 4 truck besar
 - kendaraan lain sampai 20 alat berat.

Tentang dusun, masyarakat dan haknya dikatakan bahwa hutan adalah milik pemerintah dan pemerintah yang memiliki hak untuk mengurus. Keuntungan dijanjikan akan diberikan melalui kabupaten untuk pembangunan infrastruktur desa (kantor kecamatan, poliklinik, bangunan sekolah, dan rehabilitasi sekolah). Berdasarkan UUPA No. 5 tahun 1960, masyarakat adat tetap memiliki hak ulayat atas tanah berdasarkan hukum adat yang

⁵⁹ Surat pernyataan adat bersama suku-suku yang tinggal diwilayah Sungai Digul yang disampaikan kepada Gubernur Tk. I Irian Jaya, tanggal 14 November 1989

⁶⁰ Surat Pastor Paroki Getentiri kepada Keuskupan Agung Merauke, tgl 4 Desember 1989

berlaku secara turun temurun. Sehingga, seharusnya masyarakat menerima sewa/ganti rugi hak ulayat untuk suku/marganya bukan hanya pembangunan desa. Hal ini harus dibicarakan secara baik dan teliti secara bersama dan dalam suatu wadah mengenai harga dan siapa penerima sewa/ganti rugi hak ulayat.

Oleh karena itu masyarakat diharapkan menuntut agar pembahasan mengenai hal ini dibahas secara detail, dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan (pemda, perusahaan, masyarakat). selain itu juga sangat perlu dibahas mengenai sewa-menyewa hak ulayat dengan pertimbangan:

- Masyarakat Auyu tidak mengenal jual beli tanah
- PT tidak akan selamanya tinggal/pakai diwilayah
- Keturunan tidak perlu kehilangan tanah

Setelah dipahami secara rinci dan disepakati kemudian baru diusulkan pembahasan mengenai harga sewa/ha maupun lamanya kontrak.

Harapan masyarakat adalah agar hasil sewa-menyewa itu menjadi adil bagi kedua belah pihak. Agar kedepannya modal usaha/pembangunan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat termasuk pembangunan satu usaha untuk menciptakan lapangan kerja⁶¹.

5. Konflik perusahaan dengan warga lokal

Konflik pihak perusahaan dengan warga lokal, yakni:

- Pada tahap persiapan, perusahaan Korindo Group bekerja sama dengan pemda setempat menentukan lokasi dan wilayah operasi. Warga pemilik dusun hanya bisa menerima kebijakan tanpa banyak perlawanan terhadap kebijakan perusahaan dan pemerintah daerah.
- Wilayah operasi perusahaan tidak banyak diketahui oleh warga. HPH milik perusahaan dinilai masyarakat saat ini sudah melewati batas yang seharusnya⁶².
- Kompensasi pembayaran tidak langsung ditujukan pada masyarakat lokal tapi diserahkan pada Pemda setempat.
- Semakin terlihat bahwa perusahaan mencari tenaga kerja luar Papua karena alasan kualitas kerja, hal ini menyebabkan bahwa perusahaan tidak banyak membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat lokal.

⁶¹ P. Juliono, Delsos KAM, surat tanggal 12 Desember 1989

⁶² wawancara dengan anggota masyarakat di Getentiri, 21 Maret 2004.

Bab V

Study Kasus: Pembunuhan Terhadap Willem Onde dan John Tumin Kandang⁶³

1. Kronologis peristiwa penculikan dan pembunuhan

Tanggal 10 September 2001

Menurut **Pastor Kees de Roy, MSC**, Pastor Paroki Getentiri, sekitar pk. 10.00 Willem Onde datang menemui Direktur Korindo Group, Mr. Lee di ruang kerjanya di Asiki. Ketika menemui Direktur Korindo itu **Willem Onde** berpakaian rapih. **Mr.Lee** saat itu bahkan sempat melucu dengannya.

Kira-kira jam 11.00 WIT, **Vitalis Anggayom**⁶⁴ yang sementara menunggu mobil ke Asiki di Camp III melihat Willem Onde dan John Tumin dengan mengendarai sepeda motor “Yamaha YT” lewat ke arah sawit-sawit. Begitu melihat Vitalis, Willem Onde dan John Tumin lalu berhenti. Pada saat itu Vitalis sempat bersalaman dan berpelukan dengan mereka berdua. Sekitar 15 menit mereka bercerita di mana saat itu John Tumin mengatakan bahwa, mereka berdua mau ke KM 59. Waktu itu John Tumin mengenakan baju kaos (warna gelap) di bagian dalam dan rompi (warna hijau tua), celana “levi’s” (*jeans*) yang bersaku banyak di samping kiri-kanan (warna biru yang mulai luntur) dan bersepatu, sedangkan Willem Onde mengenakan jaket putih, kaca mata gelap, dan bersepatu. Sementara itu Willem Onde, terlihat berbicara dengan seseorang (namanya tidak ketahui). Vitalis sempat mendengar Willem Onde menceritakan tentang perjalanan mereka ke markas TPN/OPM di Papua New Guinea. Ketika Willem Onde dan John Tumin akan melanjutkan perjalanan ke KM 59, orang itu mengatakan, “saya tunggu kamu di sini”. Di dekat sawit mereka berdua singgah di sebuah rumah. Sekitar 3 (tiga) menit kemudian lewat 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor menuju ke arah sawit-sawit.

⁶³ Kumpulan informasi seputar dugaan tewasnya Willem Onde, SKP-KAM, Oktober 2001

⁶⁴ Vitalis Anggayom adalah petugas Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke yang saat itu bertugas di Paroki Getentiri, pendidikan STFT Fajar Timur Jayapura, umur 24 tahun. Selama bertugas di Getentiri dua kali mengunjungi Willem Onde dan anak buahnya di KM 59 dalam rangka pelayanan pastoral.

Sekitar jam 11.30 WIT, dalam perjalanan dari Asiki ke *Camp* III, taxi (mikrolet) yang ditumpangi **Walbruga** dihentikan oleh 2 (dua) anggota Kopassus. Kepada sopir mikrolet itu, kedua anggota Kopassus itu menanyakan: “apakah melihat John Tumin, mereka jalan ke arah mana?”.

Kira-kira jam 12.00 WIT seorang anggota masyarakat menumpang mobil *logging* dari KM 59 menuju *Camp* Tunas Sawa Erma. Ketika berada di KM 41, orang itu melihat ada topi dan kaca mata yang sering dipakai Willem Onde terletak di tengah jalan. Melihat barang-barang itu, sopir *logging* hendak berhenti, namun dari balik semak-semak muncul seseorang membawa senjata laras panjang sambil memberi isyarat dengan tangannya agar mobil *logging* terus saja, tidak usah berhenti. Seseorang yang membawa senjata laras panjang itu dikenal sebagai anggota Kopassus.

Tanggal 11 September 2001

Sekitar pk. 14.00 beberapa anak kecil yang sementara bermain di jembatan Kondap, Jalan Kuprik Kelapa Lima sangat kaget melihat mayat sedang terapung diantara tiang jembatan dan kapal kayu yang sedang tambat. (Jembatan Kondap, sekitar 5 kilometer dari pusat kota Merauke). Anak-anak kecil lantas menyampaikan berita kepada 4 (empat) orang Mappi yang berada di sekitar jembatan. Setelah ke-empat orang itu datang melihat mayat itu, mereka lalu melaporkan keberadaan mayat itu ke Pos Polisi Sektor (Polsek) Kelapa Lima. Beberapa saat kemudian polisi datang ke lokasi kejadian. Bersama polisi, mereka ber-empat lalu mengangkat mayat itu dari bawah jembatan dan selanjutnya di bawa ke RSUD Merauke.

Saat mayat di RSUD Merauke, kondisinya dalam keadaan: terdapat lubang pada leher kiri, lubang (kira-kira sebesar bola tenis lapangan) pada mata sebelah kanan, tangan kanan patah, terdapat memar pada siku sebelah kiri. Selain itu, korban mengenakan tas pinggang warna hijau digantung pada leher korban. Didalam tas pinggang itu terdapat 3 (tiga) buah peluru, 1 (satu) dos peluru (masih utuh), 1 dos peluru senapan angin, 1 (satu) lembar foto, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) milik John Tumin. Menurut keterangan saksi barang-barang itu sudah diambil polisi.

Sekitar pk. 19.00, sehabis diotopsi mayat John Tumin dibawa ke rumahnya di Jalan Kelapa Satu, RT 03, Kelurahan Kelapa Lima untuk disemayamkan.

Di Getentiri sore hari, keluarga **Devota** di Merauke menyampaikan berita pembunuhan suaminya, John Tumin melalui SSB kepada Pastor Paroki Getentiri, Pastor Kees de Roy, MSC. Ketika mendengar berita itu Devota tidak percaya. Saat itu Devota mengatakan, “Ini tidak mungkin. Sebab, kami berdua baru saja merencanakan kemarin untuk pergi belanja keperluan rumah tangga sehari-hari di Asiki”. “Bagaimana mungkin mayatnya diketemukan hari ini di Merauke?”. “Saya tidak percaya!” katanya.

Tanggal 12 September 2001

Sekitar pk. 13.00 mayat John Tumin Kandam di kebumikan di Pekuburan Umum Yobar - Merauke, setelah diadakan ibadat pelepasan yang dipimpin oleh Pastor Paroki Kelapa Lima, **Pastor Cayetanus Tarong, MSC** di rumah keluarga di Jalan Kelapa Satu RT 03, Kelapa Lima. Tiga hari kemudian seorang anggota TNI dari KORAMIL Kelapa Lima (namanya tidak diingat lagi) datang menemui pihak keluarga untuk meminta informasi sekitar meninggalnya John Tumin Kandam. Namun pihak keluarga tidak dapat memberi informasi yang dimaksudkan oleh karena pihak keluarga sendiri juga tidak mengetahui penyebab pembunuhan John Tumin Kandam. Pihak keluarga sendiri baru mengetahui informasi meninggalnya John Tumin sekitar jam 19.00 WIT. Menurut anggota KORAMIL itu ia diperintah atasannya.

Tanggal 13 September 2001

Begitu mendengar berita pembunuhan terhadap John Tumin, 6 (enam) anggota TPN/OPM pk. 04.00 dini hari mendatangi lokasi kejadian. Mereka menyusuri ke dalam hutan-hutan bagian kiri-kanan jalan sejauh dua kilometer. Saat itu mereka menemukan topi Willem Onde dan juga kaca mata hitam milik John Tumin. Mereka melihat ada ceceran darah di tanah di mana barang-barang tersebut ditemukan. Selain itu, ditemukan pula 3 (tiga) selongsong peluru. Perinciannya sebagai berikut: 2 (dua) selongsong senjata laras panjang jenis FNC dan 1 (satu) selongsong peluru kecil.

Tanggal 14 September 2001

Pk. 17.25 WIB Kantor Berita Antara di Jayapura menyiarkan berita tentang dugaan pembunuhan pimpinan TPN/OPM Willem Onde. Dugaan pembunuhan Willem Onde ini didasarkan pada ditemukannya berbagai perlengkapan yang biasanya digunakan Willem Onde. Seperti kaca mata hitam, topi yang dipenuhi bercak darah, namun jenasahnya tidak ditemukan di sekitar lokasi penemuan.

Sekitar pk. 19.00 malam hari, seorang saksi⁶⁵ yang sementara mendayung perahu pulang dari kebunnya di Kiwi di Kali Maro, menemukan satu mayat sementara terapung (dalam posisi tengkurap kedalam air). Saksi kemudian mengikat tangan kanan mayat itu dengan tali *wakati*⁶⁶ dan di sangkutkan pada sebatang kayu yang sedang hanyut. Begitu sampai di rumahnya di Kelapa Lima saksi langsung melapor ke Polsek Kelapa Lima.

Kira-kira pk. 14.30, saksi dan dua orang lagi bersama polisi dan petugas RSUD Merauke datang ke lokasi mayat ditemukan. Saksi dan dua orang tersebut masuk ke dalam kali lalu

⁶⁵ Peristiwa penembakan terhadap saksi kunci kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay membuat saksi tidak bersedia namanya disebut dalam laporan ini. Hal yang sama pula berlaku bagi saksi-saksi yang lain.

⁶⁶ Pohon Wakati adalah nama lokal di Merauke untuk pohon Waru. Talinya sering dipakai masyarakat untuk mengikat kayu bakar atau barang bawaan lainnya ketika mereka pulang dari hutan.

mengangkat mayat itu. Namun, ketika mayat diangkat pada kaki mayat tersebut diikat dengan kabel telepon dan kemudian ujung lainnya diikatkan pula pada sebatang pohon yang tenggelam didalam Kali Maro.

Ketika mengangkat korban, saksi lain melihat ada 3 (tiga) lubang kecil pada kepala bagian belakang, tulang tangan kanan putus (tinggal kulit sebagai penahan), daging pada telapak kaki kiri-kanan tidak ada. Saat itu korban pakai celana panjang jeans warna biru. Kemudian korban langsung dibawa ke RSUD Merauke.

Tanggal 15 September 2001

Berita dugaan pembunuhan Willem Onde juga disiarkan Radio Republik Indonesia (RRI) Pusat Jakarta pada jam 06.00 WIT. Sebagian masyarakat yang mendengar berita tersebut merasa kaget dan heran. Karena belum hilang dalam ingatan mereka tentang pembunuhan John Tumin, tiba-tiba masyarakat Merauke dikagetkan dengan ditemukannya mayat kedua di Kali Maro (di Kiwi, Kelapa Delapan). Mayat tersebut dimasukkan dalam karung; kondisi badan penuh memar bekas pukulan benda keras, rambut dan jenggot tidak ada, kepala bagian belakang terdapat luka-luka, dan terdapat bekas tembakan di dada sebelah kanan. Mayat kedua yang ditemukan itu diyakini sebagai Willem Onde.

2. Tindakan Pasca Peristiwa⁶⁷

Senin, 17 September 2001

Mengenai pembunuhan terhadap Willem Onde itu, **Komandan Komando Distrik Militer (DANDIM) 1707 Merauke, Letkol Inf. A. Sudarmadji** yang dikutip Harian Cenderawasih Pos mengatakan, "saya sudah dengar itu, tapi belum ada kepastian. Sebab, tidak ada laporan dari pos Asiki atau Tribuana. Jadi *no comment* dulu. Saya belum dapat pastikan hal itu. Memang sudah ada perintah dari Panglima untuk mengecek hal itu" ⁶⁸.

Senada dengan DANDIM 1707 Merauke, **Komandan Satgas Tribuana (Kopassus), Mayor Inf. Hari Setiawan** mengatakan, "Saya juga diperintah atasan di Jayapura untuk mengecek informasi isu tewasnya Willem Onde. Saya dengar dari siaran RRI Jakarta, *wah... kok bisa, kita yang di Merauke belum tahu ada kejadian ini. Tapi nanti ada perkembangan informasi anda (wartawan Cenderawasih Pos) saya kabari*" ⁶⁹.

Kasatserse Polres Merauke, Iptu Pol. Moh. Choderi mengatakan, "Anda (wartawan Cenderawasih Pos) dengar sendiri, belum ada laporan akhir kalau isu itu benar. Justru saya baru tahu dari anda jika ada kejadian atau isu ini. Tapi kami akan terus mengecek, bila ada perkembangan, saya kabari" ⁷⁰.

⁶⁷ Kumpulan informasi seputar dugaan tewasnya Willem Onde, SKP-KAM, Oktober 2001

⁶⁸ Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos, 17 September 2001

⁶⁹ *ibid*

⁷⁰ *ibid*

Rabu, 19 September 2001

Komandan SATGAS Tribuana di Merauke, Mayor Hari Setiawan mengatakan bahwa, "Kami tidak bisa memantau seluruh kegiatan dari Willem Onde ini, sewaktu dia mengikuti konferensi Asia-Pasifik di Nauru kami tidak tahu dia ada di sana. Dan kami baru tahu setelah membaca media massa. Dan memang kami hanya bisa memantau jika yang bersangkutan berada di Merauke dan Asiki. Akan tetapi, kalau ia sudah berada di Camp 59 apalagi masuk ke hutan-hutan, kita sudah tidak bisa memantaunya lagi".⁷¹

Rabu, 26 September 2001

Kematian Willem Onde yang cukup mengagetkan dan atas simpang siurnya informasi menyusul kematiannya itu, membuat Ketua Panel Dewan Papua (PDP), Theys Hiyo Eluay akan menemui Muspida Irja untuk mempertanyakan alasan pembunuhan, kapan, dan di mana ia dibunuh, siapa pelakunya. Sejalan dengan itu, Sekjen PDP, Thaha Al Hamid di Jayapura mengatakan, "OPM akan segera membuka kantor tetap di dalam kota dan menunjuk juru bicara resmi. Sehingga setiap kejadian antara OPM dengan aparat keamanan, juru bicara ini dapat memberikan keterangan kepada masyarakat".⁷²

⁷¹ Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos, 19 September 2001

⁷² Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos, 26 September 2001

Bab VI

Dampak-Dampak

1. Dampak Ekonomi

Masuknya perusahaan dengan diiringi masuknya aparat keamanan di wilayah mengakibatkan penghasilan masyarakat berkurang. Kedatangan perusahaan, yang kemudian melakukan eksploitasi alam berupa pohon untuk produksi plywood menyebabkan masyarakat banyak kehilangan hasil hutannya. Hal ini kemudian berdampak dengan berkurangnya binatang yang ada di hutan. Binatang yang ada juga berkurang dikarenakan suara yang timbul dari alat berat yang dipakai oleh perusahaan untuk menebang kayu.

Sementara aparat keamanan sering melakukan tindakan-tindakan yang menghambat masyarakat untuk mencari nafkah. Masyarakat dilarang masuk ke hutan untuk berburu atau menebang sagu, dengan alasan ada kemungkinan kemudian bergabung dengan OPM. Selain itu juga, aparat keamanan sering meminta hasil hutan yang diperoleh masyarakat, bahkan seringkali dilakukan pemaksaan untuk itu.

2. Dampak Sosial Budaya

Masyarakat yang tergabung dalam suku-suku atau marga-marga tertentu dengan adanya perusahaan yang masuk kemudian budaya asilinya banyak terkontaminasi budaya pendatang. Selain kemudian masyarakat adat menjadi tergusur dari tanahnya, budaya masyarakat pun menjadi lama kelamaan hilang dan semakin tidak dikenal oleh keturunannya.

Konflik antar suku dan marga seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas hak ulayat mereka. Adu domba digunakan untuk kemudian menguasai tanah yang kaya hutannya. Aparat keamanan yang ada di kampung-kampung sering menyebabkan masyarakat merasa was-was, dicurigai dan merasa tidak bebas bergerak. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman tinggal dikampungnya sendiri.

3. Dampak Lingkungan

Usaha PT Korindo yang bergerak di bidang usaha plywood tentunya banyak melakukan penebangan terhadap hutan di wilayah Boven Digoel, dan hal ini sangat sedikit diiringi dengan reboisasi. Saat ini Korindo memegang HPH seluas 20.000 ha untuk 20 tahun, yang berlaku sejak 1993. Artinya sampai sekarang sudah 11 tahun. Selama kurun waktu tersebut belum ada proses perbaikan hutan yang signifikan, bahkan wilayah yang ditebang sudah keluar dari HPH yang berlaku.

Penebangan pohon juga mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem dalam hutan. Karena binatang yang tinggal di hutan meninggalkan hutan dimana sering terjadi penebangan untuk pindah ke hutan lain. Hal ini dikarenakan suara alat berat yang digunakan untuk menebang hutan yang mengakibatkan ketakutan pada binatang. Selain itu juga dengan ditebangnya sumber makanan bagi binatang, maka biasanya binatang-binatang tersebut memilih hijrah ke hutan lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan terjadi lagi kelangkaan atau bahkan kepunahan beberapa jenis binatang di wilayah Papua.

Selain masalah hutan yang mulai gundul, limbah dari pengolahan kelapa sawit yang dibuang ke kali digul juga mulai mengkhawatirkan. Limbah yang dibuang tanpa diolah meracuni air yang menyebabkan kematian ikan dan buaya yang hidup disitu. Kalau hal ini dibiarkan kemungkinan besar manusia juga terkena dampaknya, karena sungai digul merupakan sumber air bagi penduduk yang berdomisili di sepanjang sungai tersebut.

Bab VII

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sejak Polri di pisahkan dari TNI pada tahun 2000, tugas-tugas keamanan dan ketertiban otomatis berpindah tangan kepada kepolisian, sedangkan tugas TNI terbatas pada pertahanan negara. Pemisahan penuh terhadap dua fungsi tersebut dalam pelaksanaan dilapangan tidaklah mudah, tumpangtindih seringkali terjadi plus masyarakat dipedalaman masih rancu dalam memahami tugas kedua instittusi ini. pada daerah perbatasan, problem ini masih ditambah denngan belum adanya undang-undang perlibatan tentara.

Keberadaan tentara di Papua, tidaklah dapat dilepaskan dari cara pandang pemerintahan pusat terhadap permasalahan Papua. Pola pendekatan refresif terhadap OPM terbukti masih digunakan. Walaupun pola ini tidak terbukti dapat menghilangkan menumpas gerakan ini. selama priode berkuasanya orde baru gerakan ini tetap terpelihara, selesainya sebuah operasi justru memupuk semangat pemberontakan yang lain. Ini terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak berubah dan kekejaman-kekejaman yang terjadi dalam setiap operasi.

Masuknya modal melalui perusahaan nasional dan luar negeri juga tidak membawa perubahan berarti bagi kondisi masyarakat. keberdayaan sumber daya manusia yang tidak siap, membuat masyarakat berada dalam lingkaran paling luar arus ekonomi, tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan sebagian besar didatangkan dari luar Papua. Kesenjangan ekonomi, sosial dan perumahan terlihat jelas dan menjadi akar gangguan-gangguan “keamanan” yang terjadi, terlebih masuknya perusahaan yang mengambil sumber daya alam mereka tidak melalui jalur musyawaraah. Tuntutan masyarakat akan hak-hak ulayat adat dan sumberdaya alam terhadap pihak perusahaan, selalu dihadapi dengan serangkaian kekerasan militer.

Maka bisnis pengamanan adalah bisnis yang merupakan dampak langsung keberadaan perusahaan. Karena pasukan didatangkan karena adanya proyek perusahaan yang tidak direstui oleh masyarakat. walaupun adalah gejala umum pasukan ditempatkan untuk

mengamankan modal, terlepas ada atau tidaknya “gangguan⁷³” dari masyarakat. bisnis ini dapat dilihat dari keberadaan pasukan di wilayah PT Korindo Grup. Padahal korindo bukanlah alat vital yang patut dijaga TNI.

Selain itu juga muncul bentuk-bentuk bisnis ilegal lainnya sebagai sampingan dari penugasan penempatan pasukan. Pada Awalnya, bisnis sangat tergantung pada keahlian dan kecendrungan seorang anggota militer dalam melihat peluang bisnis, seperti bisnis kulit buaya di wilayah Asiki, dan penjualan bulu burung cendrawasih maupun burung cendrawasih dan penjualan minuman keras. Lama kelamaan bisnis-bisnis ini menjadi mapan dan menjadi proyek warisan yang diwariskan kepada pasukan-pasukan yang baru datang dari pasukan yang ditarik dari penugasan. Pasukan yang datang kemudian akan melanjutkan bisnis yang telah dirintis oleh pasukan sebelumnya.

Paska penyerahan diri Wiliem Onde pada 1997, sebenarnya pos-pos TNI di areal perusahaan tidak dibutuhkan lagi, apalagi pasca terbunuhnya wiliem onde.

Dengan demikian, maka seyogyanyalah penugasan militer untuk pengamanan-pengamanan perusahaan “wact dog” haruslah di hentikan. Demikian juga halnya kebijakan pemenuhan kebutuhan operasi yang harus dicari oleh pasukan dilapangan dengan dalih dana Swadaya. Karena kebijakan ini mempunyai dampak dan membuka peluang pada perilaku pengkayaan tiap prajurit. Dan tentunya bisnis-bisnis ini mengganggu kinerja pasukan yang dalam penugasan ditujukan untuk menjaga pertahanan negara.

⁷³ Gangguan disini dapat berarti positif dari sudut pandang gerak masyarakat, seperti perjuangan masyarakat menuntut haknya pada perusahaan karena tanahnya atau hasil alamnya di eksploitasi oleh perusahaan tanpa adanya timbal balik untuk masyarakat.

Lampiran-lampiran

1. Hasil-hasil wawancara
2. Laporan atau data-data kantor pemerintah
3. Temuan-temuan
4. Foto dan film
5. Laporan kegiatan
